

**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WISATA KULINER PANTAI
GALESONG BERDASARKAN ASPEK KEBERLANJUTAN**

MUHAMMAD SYAFRI L

P082201002



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WISATA KULINER PANTAI
GALESONG BERDASARKAN ASPEK KEBERLANJUTAN**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Teknik Perencanaan Prasarana

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SYAFRI L

P082201002

kepada

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK
FAKULTAS TEKNIK PERENCANAAN PRASARANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WISATA KULINER PANTAI
GALESONG BERDASARKAN ASPEK KEBERLANJUTAN**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SYAFRI L
P082201002**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Teknik Perencanaan Prasarana
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 09 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Baharuddin Hamzah, ST, M.Arch, PhD
NIP. 19690308 199512 1 001

Dr. Edward Syarif, ST, MT
Nip. 19690612 199802 1 001

Ketua Program Studi
Teknik Perencanaan Prasarana

Dekan Sekolah pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Idawarni J. Asmal, MT
NIP. 19657011994032001

Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed
NIP. 19661231 199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Baharuddin Hamzah, ST., M. ARCH., Ph.D sebagai Pembimbing Utama dan DR. Edward Syarif., ST. MT sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini telah dipublikasikan di jurnal Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), volume 5, halaman 23019-23027, dan DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6315> sebagai artikel dengan judul "Development of Galesong beach culinary tourism infrastructure based on sustainability aspects".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 09 Agustus 2022



MUHAMMAD SYAFRI L
NIM. P082201002

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Program Magister pada Program Studi Teknik Perencanaan Prasarana Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dengan judul :

“Pengembangan Infrastruktur Wisata Kuliner Pantai Galesong Berdasarkan Aspek Keberlanjutan”

Kepada Kedua Orang Tua saya tercinta, Almarhum Lamo Dg. Serang dan Almarhumah Muiyah Dg. Ngai , Mertua saya Abdullah Dg. Nigga dan Sarbini Dg. Ngimi, dan Saudara-saudara saya yang telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan serta bimbingannya, buat Istri saya Hartina Adiningsi., S.Pd yang dengan sabar memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi saya, Anak saya Azzahra Naila Arkarna, Azzahidi Abqari Kayana dan Arroyan Dylan Al Fatih yang juga selalu memberikan penyemangat dalam hidup saya.

Saya bersyukur bahwa tesis ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Baharuddin Hamzah, ST., M. ARCH., Ph.D sebagai pembimbing I, dan Dr. Edward Syarif., ST. MT sebagai pembimbing II. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih kepada mereka atas waktu luangnya membimbing dan memberikan kepercayaan selama ini kepada saya.

Kepada Ibu Dr. Ir. Idawarni J. Asmal, MT, Ibu Dr. Ir. Mimi Arifin., M.Si, dan Bapak Muhammad Akbar Walenna., ST, M.Sc, Ph.D selaku Penguji. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan dalam penyelesaian tesis ini, mulai dari tahapan Proposal, Hasil Proposal dan Ujian Tesis.

Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dosen Program Studi Teknik Perencanaan Prasarana, yang tanpa Lelah dan memberikan dorongan kepada penulis, juga buat teman-teman mahasiswa yang selalu memberikan waktu luangnya dalam diskusi-diskusi

Kepada semua pihak yang telah membantu semoga mendapat balasan dan ridho dari Allah SWT atas segala bantuan, bimbingan, serta do'a yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dari itu penulis mohon kritikan, masukan dan saran demi penyempurnaan penulisan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin yaa robbal'alaamiin.

Penulis

Muhammad Syafri L
P082201002

ABSTRAK

MUHAMMAD SYAFRI L. *Pengembangan Infrastruktur Wisata Kuliner Pantai Galesong Berdasarkan Aspek Keberlanjutan* (dibimbing oleh **Baharuddin Hamzah** dan **Edward Syarif**)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan infrastruktur wisata kuliner Pantai Galesong berdasarkan aspek keberlanjutan. Sasaran penelitian menjelaskan ketersediaan infrastruktur untuk penanganan pengembangan, menganalisis kebutuhan infrastruktur, dan menganalisis arah kebijakan pengembangan infrastruktur yang menunjang kawasan wisata kuliner. Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT untuk strategi pengembangan infrastruktur.

Kawasan kuliner Pantai Galesong terletak di atas laut dengan struktur bangunan semipermanent, yakni infrastruktur yang ada di kawasan wisata kuliner saat ini belum memenuhi standar untuk infrastruktur sebuah kawasan pariwisata seperti akses menuju lokasi wisata kuliner melewati kawasan permukiman padat dengan jalan yang sempit untuk sebuah akses kawasan pariwisata.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa infrastruktur pada kawasan wisata kuliner pantai galesong telah tersedia tetapi belum memenuhi norma standar pedoman dan kriteria. Kawasan wisata kuliner membutuhkan infrastruktur untuk menangani masalah abrasi pantai, kebakaran, pengolahan sampah, drainase, serta peningkatan jalan setapak menuju kawasan wisata kuliner. Penelitian ini dapat menjadi acuan pengembangan infrastruktur pada kawasan kuliner pantai galesong

Kata kunci: *infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, wisata kuliner, permukiman, Galesong*

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua/ Sekretaris,
Tanggal : <u>26/07/2022</u>	
 M U H A M M A D S Y A F R I L	

ABSTRACT

MUHAMMAD SYAFRI L. *Development of Galesong Beach Culinary Tourism Infrastructure Based on Sustainability Aspects (supervised by Baharuddin Hamzah and Edward Syarif)*

This study aims to analyze the development of the culinary tourism infrastructure of the Galesong coast based on sustainability aspects. The research targets to explain the availability of infrastructure for handling development, analyze infrastructure needs, and analyze the direction of infrastructure development policies that support culinary tourism areas. This research uses the SWOT analysis method for infrastructure development strategy

The culinary area of Galesong beach is located above the sea with a semi-permanent building structure where the existing infrastructure in the culinary tourism area currently does not meet the standards for infrastructure for a tourism area such as access to culinary tourism sites through dense residential areas with narrow roads for access to tourism areas.

The results of this study explain that the infrastructure in the Galesong beach culinary tourism area is available but has not met the standard norms, guidelines, and criteria. Culinary tourism areas need infrastructure to deal with coastal abrasion problems, fires, waste processing, drainage, and improvement of footpaths to culinary tourism areas. This research can be a reference for infrastructure development in the Galesong beach culinary area.

Keywords: *infrastructure, sustainable development, culinary tourism, settlements, Galesong*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Sasaran Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Lingkup Penelitian.....	6
F. Batasan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Pendekatan Teori Pariwisata.....	7
B. Defenisi Pariwisata Secara Umum	7
C. Infrastruktur Pariwisata.....	8
D. Infrastruktur Berkelanjutan dan Green Infrstruktur.....	10
E. Pariwisata Berkelanjutan.....	15
2.1. Konsep Pariwisata Berkelanjutan.....	15
2.2. Karakteristik Pariwisata Berkelanjutan	16
F. Kata wisata Jenis dan Macam Pariwisata	17
2.3. Wisata Kuliner.....	21
G. Infrastruktur Kawasan Wisata.....	23
2.4. Tata Guna Lahan	24

2.5.	Pola Permukiman.....	24
2.6.	Jalan	27
2.7.	Drainase	30
2.8.	Persampahan.....	31
2.9.	Mitigasi Bencana.....	33
2.10.	Tempat Parkir.....	34
2.11.	Penduduk	37
2.12.	Budaya	38
2.13.	Mata Pencaharian	38
H.	Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata.....	39
I.	Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (sustainable tourism development)	40
2.14.	Sustainable Development Goals (SDGs).....	40
2.15.	Pariwisata Berkelanjutan	43
2.16.	Aspek Pariwisata Berkelanjutan	44
2.16.1.	Aspek Ekonomi.....	45
2.16.2.	Aspek Lingkungan	45
2.16.3.	Aspek Sosial.....	47
2.17.	Acuan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	48
2.18.	Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	51
J.	Kriteria Kawasan Wisata	55
K.	Tipologi Kawasan Wisata	57
L.	Hasil Penelitian Terdahulu	58
M.	Sintesa Kajian Teori.....	65
N.	Kerangka Pikir Penelitian	69
BAB III	METODE PENELITIAN.....	70
A.	Lokasi Penelitian	70
B.	Diagram Alir Penelitian.....	72
C.	Variabel Penelitian	73
D.	Populasi Dan Sampel.....	74
3.1.	Sampel Bertujuan (Purposive Sampling).....	74
3.2.	Sampel Acak Sederhana (Sampel Random Sampling)	76
E.	Metode Pengumpulan Data.....	77
3.3.	Pengumpulan Data Primer	77

3.4.	Pengumpulan Data Sekunder	80
F.	Teknik Analis Data	81
3.5.	Analisis SWOT	82
3.6.	Pengertian Analisa SWOT	82
3.7.	Matrik SWOT	83
3.8.	Analisis IFAS.....	85
3.9.	Analisis EFAS	86
3.10.	Matrik SWOT dan IE.....	87
3.11.	Matrik QSPM	88
G.	Defenisi Operasional.....	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		91
A.	HASIL PENELITIAN.....	91
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	91
4.1.1.	Letak Geografis dan Administratif.....	91
4.1.2.	Demografi.....	92
4.1.3.	Perkembangan Wisata Kuliner	93
4.1.4.	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	94
4.2.	Kondisi Infrastruktur Kawasan Wisata Kuliner Pantai Galesong.....	95
4.2.1.	Tata Guna Lahan.....	96
4.2.2.	Pola Permukiman	97
4.2.3.	Kondisi Jalan	98
4.2.4.	Kondisi Drainase	98
4.2.5.	Sistem Persampahan	100
4.2.6.	Mitigasi Bencana	101
4.2.7.	Tempat Parkir.....	102
4.3.	Analisis Kebutuhan Infrastruktur.....	103
4.3.1.	Infrastruktur Drainase	104
4.3.2.	Infrastruktur Jalan.....	105
4.3.3.	Infrastruktur Persampahan	110
4.3.4.	Infrastruktur Mitigasi Bencana	112
4.3.5.	Infrastruktur Tempat Parkir	113
4.3.6.	Infrastruktur Rambu Penunjuk Arah.....	114
4.4.	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Wisata Kuliner Pantai Galesong Berdasarkan Aspek Keberlanjutan.....	115

4.4.1.	Faktor Internal dan Eksternal.....	115
4.4.2.	Matrik IFAS EFAS	115
4.4.3.	Pengembangan Infrastruktur Jalan.....	126
4.4.4.	Pengembangan Infrastruktur Drainase	129
4.4.5.	Pengembangan Infrastruktur Persampahan	132
4.4.6.	Pengembangan Infrastruktur Mitigasi Bencana.....	134
4.4.7.	Pengembangan Infrastruktur Tempat Parkir	136
4.4.8.	Pengembangan Bangunan Kuliner	138
4.4.9.	Pengembangan Rambu Penunjuk Arah.....	140
B.	PEMBAHASAN	142
4.5.	Tata Guna Lahan	142
4.6.	Pola Permukiman.....	145
4.7.	Kondisi Jalan.....	146
4.8.	Kondisi Drainase.....	149
4.9.	Sistem Persampahan.....	151
4.10.	Mitigasi Bencana	153
4.11.	Tempat Parkir.....	155
4.12.	Bangunan Kuliner.....	157
4.13.	Rambu Penunjuk Arah.....	158
4.14.	Hasil Pembahasan Terkait Dasar Teori	159
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	166
A.	KESIMPULAN	166
B.	SARAN	167
DAFTAR PUSTAKA.....		169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Satuan ruang parkir (SRP) untuk mobil penumpang (dalam cm)....	35
Gambar 2. Satuan ruang parkir (SRP) untuk bus/truk (dalam cm)	36
Gambar 3. Satuan ruang parkir (SRP) untuk sepeda motor (dalam cm)	37
Gambar 4. Kerangka Pikir	69
Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian	70
Gambar 6. Diagram Alir Penelitian	72
Gambar 7. Analisa SWOT	83
Gambar 8. Matriks SWOT	86
Gambar 9. Matriks EFAS	87
Gambar 10. Matriks Internal - Eksternal	88
Gambar 11. Matriks QPSM	89
Gambar 12. Peta Kecamatan Galesong	92
Gambar 13. Existing Bangunan Kuliner	96
Gambar 14. Pola Permukiman	97
Gambar 15. Existing Jalan	98
Gambar 16. Peta Existing Drainase	99
Gambar 17. Existing Drainase	100
Gambar 18. Sampah Plastik	101
Gambar 19. Tempat parkir existing	102
Gambar 20. Jaringan Drainase Existing	104
Gambar 21. Jaringan Jalan Existing	107
Gambar 22. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah	110
Gambar 23. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah	111
Gambar 24. Kendaraan pengunjung parkir di bahu jalan	114
Gambar 25. Diagram IE Matriks	123
Gambar 26. Kondisi Jalan Setapak	126
Gambar 27. Jalan menuju kawasan kuliner	127
Gambar 28. Rencana Pengembangan Jalan	128
Gambar 29. Tata Letak SRAH	129
Gambar 30. Drainase Tertutup dan Bak Kontrol Grill	130
Gambar 31. Jaringan Drainase Tertutup dan Ipal Komunal	131
Gambar 32. Pengelolaan Limbah Dengan Sistem Ipal Komunal	132
Gambar 33. Rencana Area Parkir	138
Gambar 34. Contoh Konstruksi Terapung	139
Gambar 35. Usulan Konseptual Signage	141
Gambar 36. Kuliner pada sempadan pantai	143
Gambar 37. Tambatan Perahu	144
Gambar 38. Kawasan permukiman pantai galesong	145
Gambar 39. Kondisi Jalan Setapak	147
Gambar 40. Jalan menuju kawasan kuliner	147
Gambar 41. Kerusakan Dinding Pemecah Ombak	154
Gambar 42. Struktur bangunan kuliner	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Jalan.....	30
Tabel 2. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP).....	35
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	61
Tabel 4. Sintesa Kajian Teori	66
Tabel 5. Jadwal Penelitian.....	71
Tabel 6. Variabel Penelitian.....	73
Tabel 7. Metode Pengambilan Sampel	74
Tabel 8. Kebutuhan Data	81
Tabel 9. Contoh Matrik SWOT	84
Tabel 10. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 - 2019	93
Tabel 11. Pendapat masyarakat terkait infrastruktur wisata kuliner	95
Tabel 12. Harapan Masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur.....	103
Tabel 13. Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan.....	108
Tabel 14. Faktor Internal.....	116
Tabel 15. Faktor Eksternal	117
Tabel 16. Perhitungan Bobot dan Rating	117
Tabel 17. Alternatif Strategi.....	120
Tabel 18. Pengembangan Infrastruktur	123
Tabel 19. Klasifikasi Jalan.....	127
Tabel 20. Kerusakan Dinding Pemecah Ombak.....	134
Tabel 21. Pemanfaatan Lahan.....	142
Tabel 22. Jumlah bangunan kuliner yang terbangun diatas sempadan pantai	143
Tabel 23. Kerusakan dinding pemecah ombak.....	154
Tabel 24. Hasil Pembahasan	159
Tabel 25. Konsep Pengembangan Infrastruktur Wisata Kuliner Berkelanjutan	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi pariwisata yang menjanjikan. Sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata, tentu membuat sektor pariwisata Indonesia menjadi primadona. Industri pariwisata di Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan potensi pariwisatanya. Pengembangan industri pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, karena dapat bertindak sebagai industri sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Kawasan pesisir dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar. Sumberdaya alam pesisir merupakan salah satu sumberdaya alam yang terdapat di Indonesia dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan adalah wisata kuliner. Wilayah pesisir telah banyak dimanfaatkan dan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir. Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi wilayah pesisir terus bertambah.

Kawasan pantai merupakan daerah yang sangat menarik untuk ditata dan diolah menjadi suatu kawasan area terbuka (open space) atau kawasan wisata kuliner, namun kenyataan yang terjadi justru kawasan pantai ini menjadi daya tarik tersendiri oleh para nelayan untuk mendirikan bangunan hunian / pemukiman dengan tujuan agar dekat dengan tempat mencari nafkah mereka. Bangunan yang terdapat pada area tepian pantai (pesisir) secara teori harus memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter bangunan yang ada di daerah daratan. Perbedaan itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal (menyangkut pola hidup/perilaku masyarakat, budaya dan sebagainya) maupun faktor eksternal (menyangkut iklim, lokasi dan sebagainya).

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang sangat menunjang pertumbuhan industri pariwisata. Sarana dan prasarana harus ada dalam suatu kawasan wisata untuk menciptakan kepuasan wisatawan. Sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu penunjang agar daya tarik wisata di kawasan ini diminati oleh wisatawan karena apabila sarana dan prasarana tidak dikembangkan dengan baik akan berakibat berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung. Infrastruktur pada sebuah destinasi wisata merupakan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata di sebuah destinasi wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, halte, jembatan, dan lain sebagainya. Kesiapan destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan pada daerah tujuan wisata memerlukan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dengan penyesuaian lokasi serta kondisi destinasi wisata yang bersangkutan Hermawan (2017).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan mensejahterahkan komunitas masyarakat lokal jika mampu dikelola dengan baik. Pariwisata memberikan efek yang cukup besar baik terhadap kesejahteraan masyarakat maupun terhadap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup yang harmonis. (Amerta dkk. 2018) menyebutkan bahwa *Sustainable Tourism Development* adalah konsep pariwisata yang dicita-citakan oleh masyarakat yang paham pentingnya keberlanjutan, yang menekankan pada keberlanjutan pengembangan suatu kawasan pariwisata, dengan tiga aspek yakni lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Masing-masing dari ketiga jenis infrastruktur ini memiliki variabel tersendiri yang tentunya dapat menggambarkan sisi infrastruktur masing-masing. Misalnya, dari sisi infrastruktur ekonomi terdapat jenis infrastruktur seperti halte, gazebo, fasilitas keamanan, dan lain sebagainya. Hal yang sama juga berlaku untuk infrastruktur sosial dan lingkungan yang juga dikaji dalam penelitian ini. Semua jenis infrastruktur ini membutuhkan strategi perencanaan yang baik dan terpadu oleh semua stakeholder dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukan kajian secara detail tentang kesiapan infrastruktur sosial, ekonomi dan lingkungan yang ada pada destinasi-destinasi wisata yang telah menjadi pilihan dalam penelitian ini agar terwujudnya *Sustainable Tourism Development*. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat dapat dicapai karena pariwisata

berkontribusi terhadap penerimaan devisa, peningkatan kesempatan berusaha dan membuka kesempatan kerja. Pariwisata merupakan sarana/media yang menjembatani potensi wisata suatu wilayah (wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata kuliner, atau wisata lainnya) terhadap para wisatawan, baik domestik maupun manca negara salah satunya wisata kuliner yang berada dipesisir pantai Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Galesong sebagai salah satu kecamatan yang terletak disebelah selatan dan berjarak kurang lebih 17 kilometer dari ibukota Kabupaten Takalar. Luas wilayah Kecamatan Galesong sekitar 25,93 km² atau sebesar 4,57 persen dari total Kabupaten Takalar yang memiliki 14 desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berada pada 3 desa yang berada dipesisir pantai Galesong yaitu Desa Galesong Kota, Desa Galesong Baru dan Desa Palalakkang yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan tinggal di dalam suatu kawasan permukiman yang padat dengan infrastruktur yang kurang memadai.

Kecamatan Galesong memiliki Kawasan wisata kuliner pesisir pantai yang mempunyai peran penting dalam industri pariwisata. Sebab sebagian besar pengeluaran wisatawan untuk kuliner. Selain itu, kuliner menjadi daya tarik yang kuat untuk mendatangkan wisatawan. Wisata kuliner pesisir pantai Kecamatan Galesong mulai hadir pada tahun 2017 dan hingga saat ini telah terdapat sepuluh kuliner dengan pengunjung perhari sekitar 50-150 orang. Dengan melihat jumlah pengunjung akan berpeluang besar untuk kuliner yang ada sekarang akan mengembangkan usaha kulinernya dan akan ada kuliner-kuliner baru dipesisir pantai Kecamatan Galesong yang harus dipersiapkan infrastrukturnya untuk menunjang kawasan wisata kuliner, karena infrastruktur yang ada dikawasan wisata kuliner saat ini belum memenuhi standar untuk infrastruktur sebuah kawasan pariwisata seperti akses menuju lokasi wisata kuliner melewati kawasan permukiman padat dengan jalan yang sempit untuk sebuah akses kawasan pariwisata, belum tersedianya fasilitas parkir didalam Kawasan kuliner sehingga untuk mencapai lokasi kuliner harus ditempuh dengan berjalan kaki dengan melewati rumah-rumah penduduk dan kendaraan pengunjung diparkir dengan memanfaatkan bahu jalan yang dapat memicu kemacetan demikian juga yang sudah menyediakan lahan parkir bagi pengunjung belum memadai.

Untuk menjadikan kawasan wisata kuliner pantai Kecamatan Galesong sebagai kawasan wisata yang terkenal dan diminati oleh wisatawan maka perlu untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur yang ada dan nantinya akan dikembangkan dan pengembangannya disesuaikan kondisi fisik kawasan wisata kuliner sehingga dapat dikatakan layak sebagai daerah tujuan wisata. Melihat permasalahan yang disebutkan di atas, maka perlu adanya upaya yang lebih serius terhadap penanganan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka mendukung wisata kuliner di sepanjang garis pantai Kecamatan Galesong yang akan berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Kecamatan Galesong pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Takalar pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang terjadi pada kawasan wisata pantai galesong, maka rumusan masalah pokok penelitian ini yaitu “**bagaimanakah pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan?**” Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana ketersediaan infrastruktur Kawasan wisata kuliner pantai Galesong?
2. Infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk suatu kawasan wisata kuliner yang menunjang aspek keberlanjutan pada Kawasan wisata kuliner pantai Galesong?
3. Bagaimana kebijakan pengembangan infrastruktur yang menunjang kawasan wisata kuliner berdasarkan aspek keberlanjutan?

C. Tujuan Dan Sasaran Penelitian

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan.

Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan ketersediaan infrastruktur untuk penanganan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka mendukung wisata kuliner di sepanjang garis pantai Kecamatan Galesong.
2. Menganalisis kebutuhan infrastruktur yang berkelanjutan untuk suatu kawasan wisata kuliner.
3. Menganalisis arahan dan kebijakan pengembangan infrastruktur yang menunjang kawasan wisata kuliner.

D. Manfaat Penelitian

1. Pengembangan keilmuan
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, masukan bagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan infrastruktur Kawasan wisata kuliner berdasarkan aspek keberlanjutan sehingga pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan.
 - b. Dapat menambah literatur bahan kajian penelitian pengembangan infrastruktur Kawasan wisata kuliner berdasarkan aspek keberlanjutan
2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan wisata kuliner pantai Galesong berdasarkan aspek keberlanjutan dengan bekerja sama dengan para pelaku pariwisata dengan melibatkan masyarakat yang berada disekitar industri pariwisata.

E. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini meliputi pengamatan terhadap pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai Kecamatan Galesong berdasarkan aspek keberlanjutan di Desa Galesong Kota, Desa Galesong Baru dan Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

F. Batasan Penelitian

Batasan suatu penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian terbatas pada penanganan prasarana infrastruktur yang berkelanjutan yang berfokus pada aspek lingkungan dalam rangka mendukung wisata kuliner di Desa Galesong Kota, Desa Galesong Baru dan Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendekatan Teori Pariwisata

Sebagian definisi pariwisata telah banyak dijabarkan oleh sebagian pakar mencakup etimologis, definisi pariwisata secara universal berikut ini akan diuraikan mengenai definisi pariwisata dari sebagian pakar.

Menurut bahasa Sansekerta, pariwisata terdiri dari kata "pari" serta "wisata". "Pari" berarti banyak, berulang kali, berputar-putar, serta lengkap. Sedangkan "wisata" berarti perjalanan atau berpergian. Sehingga pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berulang kali ataupun berputar-putar dari sesuatu tempat ke tempat lain.

B. Definisi Pariwisata Secara Umum

Definisi pariwisata menurut Yoeti (1985) dalam (Pratama dkk. 2016), merupakan sebagai suatu fenomena pada dikala ini yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan serta pergantian hawa. Serta memunculkan penilaian yang sadar serta meningkatkan (cinta) terhadap keindahan alam serta menambah pergaulan berbagai bangsa serta kelas masyarakat. Dan hal itu merupakan hasil dari pertumbuhan perniagaan, industri, perdagangan dan penyempurnaan alat-alat pengangkutan. Sedangkan menurut Wahab dalam (Pratama dkk. 2016) pengertian pariwisata adalah sebagai berikut :

"A proposeful human activity that serves as a link between people either within one same country or beyond the geographical limits or states. It involves the temporary displacement of people to another region, country or continent for satisfaction of varied needs other than exercising a remunerated function. For the concerned tourism is an industry who „product“ are consumed on the pot forming "invisible-export". The benefit accuring there from can be withnessed in the economic, cultural and social life of its community."

Dari penafsiran di atas mengatakan jika pariwisata merupakan sesuatu kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar buat mendapatkan kepuasan yang beraneka ragam. Tidak hanya itu diterangkan pariwisata sebagai suatu industri

yang menciptakan produk yang dikonsumsi di tempat tujuan. Untuk daerah tujuan wisata, perihal ini merupakan suatu ekspor yang tidak kentara (invisible- exports). Dan utilitas yang lain yakni berpengaruh positif untuk perekonomian, kebudayaan serta kehidupan sosial warga setempat.

C. Infrastruktur Pariwisata

Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata perlu disesuaikan suatu objek wisata yang pada waktunya dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri, selain itu juga diperlukan koordinasi dan dukungan antar instansi terkait. Hyman (1996) juga memandang infrastruktur sebagai barang kapital dengan menekankan pada aspek fisiknya yaitu dimana infrastruktur negara adalah transportasi dan kapital lingkungan yang terdiri dari sekolah, listrik, jaringan komunikasi dan sistem kesehatan.

Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, penandaan, pengairan, drainase, tempat sampah, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi Grigg (1988). Dengan kata lain infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Sedangkan fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat disebut sebagai sistem infrastruktur.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan Kodoatie (2005). Infrastruktur merupakan pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi, kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan, sampah terpusat, pusat oleh-oleh dan bangunan untuk kegiatan masyarakat serta fasilitas pendukung lainnya (Rutherford n.d. 2002) Infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara keseluruhan dan sekaligus

menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan Kodoatie (2005).

Komponen infrastruktur merupakan bagian-bagian dari infrastruktur yang dianggap memiliki peran penting terhadap perekonomian dan sosial. Dalam World Development Report (1994) infrastruktur terdiri dari:

1. Prasarana Umum: listrik, telekomunikasi, pipa air bersih, sanitasi dan system pembuangan yang terdiri dari pembuangan limbah padat dan pembuangan pipa gas.
2. Infrastruktur Umum: Jalan, bendungan utama, dan kanal untuk irigasi dan drainase
3. Sektor Transportasi: Jalur kereta api, pelabuhan, bandar udara dan jalur air.

Sedangkan infrastruktur menurut Stone (1974), adalah berbagai macam fasilitas fisik yang diperlukan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan-pelayanan lainnya yang sama. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan, termasuk kawasan wisata pantai.

Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana kepariwisataan dapat dibagi menjadi 3 bagian (Yoeti 2002) mengatakan:

1. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Tourism Superstructure*)
Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan sangat tergantung pada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Sarana pokok kepariwisataan berfungsi dalam memberikan

fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:

- a) Perusahaan yang kegiatannya mempersiapkan dan merencanakan perjalanan wisatawan atau disebut dengan *receptive tourist plan* yaitu perusahaan yang mempersiapkan perjalanan dan penyelenggaraan tour-tour bagi wisatawan seperti *Travel Agent, Tour Operator*, dan lain-lain.
- b) Perusahaan yang memberi pelayanan di daerah tujuan kemana itu pergi, atau bias disebut *residential tourism plan* yaitu perusahaan yang memberikan layanan penginapan, menyediakan makanan dan minuman di daerah tujuan wisata, misalnya : *hotel, hostel homestay, cottage, pension*, dan sebagainya.

2. Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing Tourism Superstructure*)

Merupakan perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas rekreasi yang fungsinya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dan membuat wisatawan dapat lebih lama tinggal di suatu daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah sarana/fasilitas olah raga, shelter dan sarana lainnya.

3. Sarana penunjang kepariwisataan

Merupakan perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok. Fungsinya tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal di suatu daerah tujuan wisata, tetapi mempunyai fungsi yang lebih penting, yaitu agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang dikunjunginya. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah : Night Club, Steam Baths, Casinos dan lain-lain.

D. Infrastruktur Berkelanjutan dan Green Infrstruktur

Infrastruktur berkelanjutan merupakan sebuah konsep dari pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan infrastruktur pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Iwan PK, dkk, 2008). Dengan demikian dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan perlu memperhatikan dan mengintegrasikan tiga aspek keberlanjutan meliputi

keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sumber daya. Melalui keberlanjutan ekonomi diharapkan kegiatan ekonomi dapat terus berjalan dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari aspek Pendidikan maupun kesehatan.

Konsep lingkungan berkelanjutan perlu diintegrasikan dalam pembangunan infrastruktur agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan baik dalam skala lokal maupun global. Dalam skala lokal artinya aktivitas yang dilakukan tidak menghasilkan polusi atau limbah yang dapat mengganggu atau merusak keseimbangan ekosistem, baik komponen biotik (tumbuhan dan hewan) maupun komponen abiotik (tanah, air dan udara). Dalam skala global, pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan dampak atau eksternalitas negatif terhadap keseimbangan alam secara global yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global atau perubahan iklim. Konsep keberlanjutan dalam sumber daya perlu diupayakan mengingat pembangunan infrastruktur sebagian besar menggunakan energi yang berasal dari perut bumi yang bersifat *unrenewable* atau tidak terbarukan baik untuk transportasi, industri, pembangkit listrik dan fasilitas lainnya. Selain itu dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah serta banyaknya alih fungsi lahan dari lahan terbuka hijau menjadi lahan tertutup, baik untuk permukiman maupun industri, akan terus mengurangi ketersediaan sumber daya terutama air dan pangan dimasa yang akan datang (Danaryanto dkk, 2008 dalam Kodoatie dan Sjarief (2010)

Konsep utama pembangunan berkelanjutan yaitu bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengurangi tingkat kemiskinan tanpa merusak ekosistem atau mengurangi kualitas lingkungan. Pembangunan berkelanjutan harus mampu mencakup isu-isu Pendidikan dan kesehatan, budaya, teknologi tepat guna, penyediaan pangan, air bersih dan perumahan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan harus pula didukung oleh system infrastruktur berkelanjutan sebagai wadah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi daerahnya.

Salah satu konsep pembangunan berkelanjutan yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah konsep infrastruktur hijau atau *green infrastructure*. Infrastruktur hijau adalah system

jaringan strategis yang direncanakan dan dikelola dari habitat alami, bekerjasama dengan sistem landsekap dan ruang terbuka lain untuk melestarikan nilai-nilai dan fungsi ekosistem agar lebih bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Komponen utama infrastruktur hijau menurut Benedict dan Edward (2001), yaitu mencakup berbagai ekosistem alami maupun yang telah diperbaharui dan landsekap yang membentuk system “pusat (hub)” dan “jaringan (link)”. Hub merupakan pusat jaringan infrastruktur hijau. Pusat ini dapat berupa cagar lama, landsekap alami yang telah dikelola, area produksi yang terbuka, taman wilayah dan preservasi taman komunitas dan area di mana fitur alam dan proses ekologi dilindungi dan/atau direstorasi. Adapun link adalah koneksi yang mengikat agar pusat atau hub dari infrastruktur hijau bekerja. Yang termasuk kedalam *link* diantaranya:

- Jaringan lansdsekap, meliputi daerah alam yang luas dan dilindungi yang menghubungkan,preservasi, atau kawasan alami dan memberikan ruang yang cukup bagi tanaman dan hewan asli untuk berkembang jaringan landsekap juga dapat memberikan ruang untuk perlindungan situs bersejarah dan kesempatan untuk rekreasi;
- Koridor konservasi meliputi kawasan lindung linear yang tidak begitu luas, seperti sungai dan koridor sungai yang berfungsi sebagai saluran biologi satwa liar dan dapat memberikan kesempatan untuk rekreasi.
- Jalur hijau, meliputi koridor yang dilindungi dari tanah yang telah diolah untuk konservasi sumber daya dan/atau penggunaan rekreasi;
- Sabuk hijau, meliputi tanah alami yang dilindungi atau lahan yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pengembangan selain itu juga melestarikan ekosistem asli dan/atau peternakan
- *Ecobelts – buffer* yang dapat mengurangi zona ketegangan antara ekologi dan sosial bagi penduduk perkotaan dan pedesaan.

Teknologi infrastruktur hijau diatas, dapat bermanfaat untuk mengelola lingkungan agar mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim apabila telah dikombinasikan dengan infrastruktur "abu-abu" yang konvensional untuk mencapai keberlanjutan dan ketahanan perkotaan yang lebih baik. Manfaat yang dihasilkan dari infrastruktur hijauselain mengurangi emisi GHG juga membantu mengatasi permasalahan banjir, mengurangi polusi suara dan udara, dan menjaga keseimbangan lingkungan atau ekosistem. Infrastruktur hijau berkontribusi besar

terhadap adaptasi perubahan iklim maupun mitigasi perubahan iklim. Intervensi tersebut diakui sebagai pendekatan “win-win solution” yang diinginkan untuk memerangi perubahan iklim. Infrastruktur hijau telah memberikan beberapa keuntungan baik terhadap aspek sosial, ekonomi, dan maupun lingkungan. Benedict dan Edward, 2001 serta UNDP, 2007, mengidentifikasi manfaat besar lainnya dari infrastruktur hijau yaitu:

1. Mengelola air permukaan dengan mengurangi laju dan volume air limpasan, menangkap air, memungkinkan air untuk menyusup ke tanah, dan menyediakan tempat penyimpanan permanen atau sementara;
2. Mengelola suhu tinggi dimana pendinginan evaporatif dan naungan yang diberikan oleh infrastruktur hijau dapat menjamin bahwa kota-kota terus menjadi tempat menarik dan nyaman untuk hidup, bekerja, berkunjung, dan berinvestasi;
3. Menyimpan dan menyerap karbondioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia dengan menyimpannya di dalam tanah dan vegetasi, khususnya lahan gambut;
4. Mengelola banjir sungai dengan menyediakan tempat untuk menyimpan air, menciptakan area retensi, memperlambat arus puncak banjir dan mengurangi volume banjir sungai;
5. Meningkatkan produksi pangan;
6. Menyediakan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan mengganti bahan baku beton dan baja dengan kayu atau bahan alam lainnya yang berasal dari proses daur ulang;
7. Menyediakan bahan bakar rendah karbon termasuk bahan bakar nabatidan energi alternatif yang berasal dari angin, air dan matahari;
8. Mengurangi kebutuhan untuk perjalanan dengan mobil dengan menyediakan area rekreasi lokal dan rute perjalanan hijau sehingga individu lebih terdorong untuk berjalan kaki dan bersepeda;
9. Menyediakan landsekap yang lebih bervegetasi dan permeabel sehingga spesies dapat bergerak ke utara menuju ruang iklim yang baru;
10. Mengurangi erosi tanah dengan menggunakan vegetasi untuk menstabilkan tanah yang rentan terhadap erosi.
11. Mengelola sumber daya air dimana infrastruktur hijau mampu menyimpan air untuk digunakan kembali, memungkinkan air untuk menyusup ke dalam

tanah mempertahankan akuifer dan arus sungai, dan dapat menangkap sedimen serta menghilangkan polutan dari air, sehingga memastikan bahwa kuantitas dan kualitas air tetap terjaga;

12. Mengelola banjir pantai, infrastruktur hijau dapat menyediakan penyimpanan air dan daerah retensi, mengurangi dan memperlambat gelombang pasang, dengan demikian membantu untuk mengurangi banjir pesisir

Dari uraian diatas, banyaknya manfaat dari konsep green infrastructure telah menyebabkan pemerintah di berbagai negara mengadopsi konsep infrastruktur hijau untuk dikembangkan dan dibangun sebagai infrastruktur yang memiliki nilai ekonomi serta mampu memitigasi risiko terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu kebijakan yang diambil untuk menerapkan konsep green infrastructure di Indonesia berdasarkan hasil Seminar Empowerment For Green Cities From Planning To Action di Bandung (Djakapermana ,2011) yaitu:

1. *Green Planning & Desig*, dimana RTRW yang dibuat responsive terhadap isu perubahan iklim. Implementasi dari kebijakan ini yaitu peraturan yang mensyaratkan adanya RTH 30% dari luas wilayah.
2. *Green Open Space* (Ruang Terbuka Hijau), sebesar 30% dari luas wilayah administrasi.
3. *Green Community*, yaitu pembentukan komunitas masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan dan Gerakan yang ramah lingkungan.
4. *Green Transportation*, untuk mengurangi dampak lingkungan dari system transportasi dan mendukung program transportasi yang lebih fuel-efficient, space-saving, dan masyarakat sehat. Adapun konsep yang diterapkan yaitu melalui desain *mass transit lead cities, bike oriented city, dan avoid-shift-improve*.

Green Building (bangunan hijau), sertifikasi bangunan hijau diberikan apabila total poin nilai bangunan mencapai jumlah yang ditentukan. Sistem penilaian di Indonesia yaitu melalui metode *greenship* yang terbagi atas enam aspek penilaian, yaitu: Tepat guna lahan (*appropriate site development*), efisien energi dan refrigerant (*energy efficiency and refrigerant*), konservasi air (*water conservation*), sumber dan siklus material (*material resources and cycle*), dan manajemen Lingkungan Bangunan (*building and environment management*)

E. Pariwisata Berkelanjutan

2.1. Konsep Pariwisata Berkelanjutan

Perkembangan kepariwisataan di dunia saat ini sangat memperhatikan aspek kelestarian alam cagar budaya dan pelestarian lingkungan alam. Banyak destinasi sudah mulai meminimalkan dampak sosial budaya dan dampak lingkungan akibat pariwisata. Perkembangan pariwisata saat ini cenderung tidak lagi mengadaptasi pengembangan pariwisata massal tetapi lebih dalam bentuk pengembangan pariwisata minat khusus atau dianggap sebagai alternatif pengembangan pariwisata (Bagiada et al. 2018)

WTO (1993) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus merangkul tiga prinsip dasar ekologi keberlanjutan, keberlanjutan sosial dan budaya, dan keberlanjutan ekonomi untuk generasi sekarang dan mendatang yang akan datang. Selain keberlanjutan sumber daya alam dan ekonomi, keberlanjutan budaya juga merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata berkelanjutan akan tercapai jika ada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia di samping keberlanjutan ekonomi secara adil dan secara adil.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat tercapai jika tingkat pemanfaatan berbagai sumber daya tidak berjalan di luar kemampuan regenerasi sumber daya tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan pembangunan adalah (1) menjaga kualitas lingkungan, (2) memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan wisatawan; (3) menjaga hubungan antara pariwisata dan lingkungan; (4) menjaga kerukunan antar daerah manusia, dan lingkungan, (5) menciptakan kondisi dinamis yang disesuaikan dengan daya dukung, dan (6) semua pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam misi yang sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Amerta et al 2017)

2.2. Karakteristik Pariwisata Berkelanjutan

Misi pembangunan pariwisata berkelanjutan antara lain meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat lokal masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Kualitas budaya dan daya tarik pariwisata tetap menjadi nilai kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa meningkatkan peran serta masyarakat lokal masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata (GBHN, 2000). Ciri-ciri pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut (Bagiada et al. 2018):

1. Mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan
2. Menggunakan sumber daya alam, budaya dan sosial budaya yang berkelanjutan
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan wisata
4. Memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal
5. Menjaga keanekaragaman hayati
6. Tidak merusak lingkungan alam
7. Mengaktifkan sumber daya alam untuk generasi mendatang
8. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan objek wisata
9. Melatih masyarakat lokal agar terampil dan profesional
10. Memberikan informasi yang akurat, efisien dan efektif
11. Mengintegrasikan perencanaan holistik
12. Melakukan pemasaran secara bertanggung jawab.

Selain itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan pengembangan pariwisata sebagai berikut (Bagiada et al. 2018):

1. Pengembangan pariwisata harus mampu membangun apresiasi masyarakat adat terhadap budaya dan lingkungan.
2. Pengembangan Har berdasarkan perencanaan yang matang berusaha untuk memperkuat potensi lokal yang ada.
3. Pengembangan pariwisata didasarkan pada pelestarian dan berorientasi pada masa depan.
4. Keselarasan antara masyarakat lokal, wisatawan, dan lingkungan.
5. Penekanan pada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

6. Tidak merusak sumber daya alam.
7. Memantau perubahan yang terjadi akibat pengembangan pariwisata

F. Kata wisata Jenis dan Macam Pariwisata

Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Di samping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya, sehingga jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan akan dapat berwujud seperti diharapkan dari kepariwisataan itu sendiri. Menurut Suwena and Widyatmaja (2010) Sebenarnya pariwisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain, misalnya:

(a) Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:

1. Pariwisata lokal (local tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung.
2. Pariwisata regional (regional tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
3. Pariwisata nasional (national tourism) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warganegaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
4. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.

5. Pariwisata internasional (International tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

(b) Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

1. Pariwisata aktif (in bound tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
2. Pariwisata pasif (out-going tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri.

(c) Menurut alasan/tujuan perjalanan

1. *Business tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain.
2. *Vacational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain
3. *Educational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya : darmawisata (study tour)
4. *Familiarization tourism* yaitu suatu perjalanan anjongsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.
5. *Scientific tourism* yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.
6. *Special Mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olah raga, maupun misi lainnya.

7. *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.

(d) Menurut saat atau waktu berkunjung

1. *Seasonal tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim- musim tertentu. Contoh : Summer tourism, winter tourism, dan lain-lain.
2. *Occasional tourism* yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatawan dihubungkan dengan kejadian (occasion) maupun suatu even. Misalnya Sekaten di Yogyakarta, Nyepi di Bali, dan lain-lain.

(e) Menurut Objeknya

1. *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
2. *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
3. *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau negara tertentu.
5. *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara.
6. *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.
7. *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.

8. *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olah raga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- (f) Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan
1. *Individual tourism* yaitu seorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan secara Bersama.
 2. *Family group tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 3. *Group tourism* yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi, atau *tour oprator/travel agent*.
- (g) Menurut alat pengangkutan yang digunakan
1. *Land tourism* yaitu jenis pariwisata yang dalam kegiatannya menggunakan transportasi darat, seperti bus, taxi, dan kereta api.
 2. *Sea tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang menggunakan angkutan laut untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.
 3. *Air tourism* yaitu jenis pariwisata yang menggunakan angkutan udara dari dan ke daerah tujuan wisata.
- (h) Menurut umur yang melakukan perjalanan
1. *Youth tourism* yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan wisata dengan harga relatif murah.
 2. *Abdult tourism* yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. Biasanya orang yang melakukan perjalanan adalah para pensiunan.
- (i) Menurut jenis kelamin
1. *Masculine tourism* yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya diikuti oleh kaum pria saja, seperti safari, *hunting*, dan *adventure*.
 2. *Feminime tourism* yaitu jenis pariwisata yang hanya diikuti oleh kaum wanita saja, seperti rombongan untuk menyaksikan demonstrasi memasak.
- (j) Menurut harga dan tingkat sosial
1. *Delux tourism* yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas standar mewah, baik alat angkutan, hotel, maupun atraksinya.

2. *Middle class tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga tidak terlalu mahal, tetapi tidak terlalu jelek pelayanannya.
3. *Social tourism* yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas cukup memadai selama dalam perjalanan.

2.3. Wisata Kuliner

Kata wisata kuliner berasal dari bahasa asing yaitu *voyages culinaires* (Prancis) atau *culinary travel* (Inggris) yang artinya perjalanan wisata yang berkaitan dengan masak- memasak. Menurut Asosiasi Pariwisata Kuliner Internasional (*International Culinary Tourism Association/ICTA*) wisata kuliner merupakan kegiatan makan dan minum yang unik dilakukan oleh setiap pelancong yang berwisata. Berbeda dengan produk wisata lainnya seperti wisata bahari, wisata budaya dan alam yang dapat dipasarkan sebagai produk wisata utama, tetapi pada wisata kuliner biasanya dipasarkan sebagai produk wisata penunjang. (Besra 2012a)

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 diselenggarakan bersamaan dengan lahirnya kebijakan dan pembiayaan program verifikasi dan pemberian sertifikat *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE)* pada industri hotel, restoran dan usaha kreatif dalam ruang lingkup pariwisata dan disahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wishnutama Kusubandio. Kegiatan verifikasi dan perolehan sertifikat *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*.

Kebijakan *Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability* dilaksanakan bagi setiap pihak yang berperan didalamnya termasuk bidang restoran/rumah makan, yaitu pengusaha dan/atau pengelola restoran, karyawan restoran, dan tamu restoran. Kebijakan ini membahas panduan pada lingkup kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Panduan pelaksanaan tersebut juga dibagi berdasarkan panduan umum dan khusus. Pada panduan umum di rumah

makan kebijakan ini mengatur dua aspek, Manajemen/Tata Kelola, sedangkan pada panduan khusus mengatur pihak yang berkepentingan di dalam rumah makan berdasarkan alur pelayanan rumah makan, hal ini berupa panduan pada pengusaha dan/atau pengelola rumah makan, karyawan rumah makan, dan tamu rumah makan pada beberapa alur pelayanan rumah makan, diantaranya area pintu masuk, pelayanan makan dan minum, pembayaran dan pintu keluar, dapur, ruang administrasi, dan ruang karyawan (ruang ganti dan ruang makan)

Kebijakan Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability (CHSE) ini dibagi berdasarkan panduan umum dan khusus yang menjadi syarat pengaplikasian pada rumah makan yang kemudian dilanjutkan dengan uji verifikasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Lembaga Sertifikasi dari Indonesia Sustainable Tourism Certification (ISTC) baik oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC) atau Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Menurut Bondan Winarno (2008) dalam Besra (2012) industri kuliner di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal karena keragaman makanan dan minuman khas yang ada di setiap daerah. Kuliner khas Indonesia sangat beragam. Selain dari sisi harga makanan dan minuman yang ada di dalam negeri ini lebih terjangkau dibandingkan dengan makanan luar negeri. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand sudah lebih dahulu mempopulerkan kulinernya. Contohnya di Singapura ada tempat bernama Clark Quay dimana orang bisa makan dengan nyaman dan kualitas makanan serta penyajian yang terbaik. Kuliner Thailand seperti Tom Yam sudah dikenal baik oleh wisatawan yang datang maupun di luar Thailand.

Dibandingkan dengan negara tetangga, kuliner di Indonesia sangat beragam. Kuliner khas Indonesia tersebar di setiap daerah. Indonesia kaya akan keanekaragaman kuliner memiliki cita rasa yang enak dan dikenal oleh masyarakat luas. Kuliner Indonesia mempunyai kelebihan tersendiri, dengan berbagai budaya bercampur membawa kuliner masing-masing daerah melebur menjadi berbagai resep masakan Indonesia. Orang tidak sulit untuk mencari kuliner yang sesuai pilihan, karena begitu banyak pilihan menu dari

pedas, manis, asin, asam, pahit dan dari mulai sayuran, ikan, ayam serta berbagai minuman semuanya ada di menu kuliner Indonesia. Sebagai contoh ada beberapa kuliner Indonesia yang disukai seperti mie Aceh, lontong Medan, Rendang Padang, sayur asem Jakarta, Rawon Semarang, Gudeg Yogya, Bakso Solo , ayam rica-rica Makasar, dll

G. Infrastruktur Kawasan Wisata

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu parameter pelaksanaan pembangunan wilayah (Sukwika, 2018). Pembangunan infrastruktur adalah perencanaan dalam membangun infrastruktur baik dalam membangun jalan, saluran pembuangan, rumah sakit, sekolah dan fasilitas publik lainnya (Chang et al., 2012).

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan beberapa pola atau konsep. Di antaranya adalah konsep green infrastructure, yaitu konsep yang mengutamakan perhatian terhadap keberlangsungan hidup suatu bangsa secara alami dengan menjaga kelestarian alam dan habitat satwa dan juga mempertahankan sumber udara dan air yang bersih dan berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat (Chang et al., 2012). Kemudian juga terdapat pembangunan infrastruktur di Negara maju menggunakan konsep compact city, yaitu paradigm urbanisme dengan memanfaatkan semua potensi infrastruktur seperti pemanfaatan lahan campuran; transportasi berkelanjutan dan penggunaan ruang terbuka hijau sebagai kunci keberlanjutan pembangunan pada aspek ekonomi, lingkungan dan social (Bibri et al., 2020).

Pembangunan infrastruktur di Negara maju dengan Negara berkembang relative berbeda. Kecenderungan perencanaan pembangunan infrastruktur di Negara maju telah memikirkan dampak terhadap multi aspek seperti aspek ekonomi, lingkungan dan social (Gaddefors, Korsgaard, & Bruun, 2019). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan secara menyeluruh. Kemudian sumber daya yang ada di Negara maju juga mendukung perencanaan pembangunan yang mendukung semua aspek. Sementara di Negara berkembang perencanaan pembangunan infrastruktur terfokus pada keberlanjutan salah satu aspek saja misal ekonomi atau lingkungan.

2.4. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan (Land Use) adalah pengaturan penggunaan lahan yang mencakup penggunaan bumi baik didaratkan maupun peruntukan bumi di lautan. Sedangkan penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud-maksud pembangunan secara optimal dan efisien. Penggunaan lahan merupakan cerminan hubungan keterkaitan antara sirkulasi dan kepadatan aktivitas/fungsi dalam kawasan. Setiap kawasan memiliki karakteristik penggunaan lahan yang berbeda, sesuai dengan daya tampungnya, kemudahan pencapaian, kondisi fisik alam, sistem transportasi dan kebutuhan penggunaan lahan individual (Jayadinata, 1999). Bila dilihat dari bentuk fisik ruang perkotaan atau disebut juga morfologi kota adalah merupakan hasil bentukan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik (Soetomo, 2009). Hal ini dapat diartikan bahwa bentuk fisik ruang kota menggambarkan susunan ruang yang dipengaruhi oleh berbagai elemen pembentuknya seperti sosial-budaya kemasyarakatannya, pertumbuhan ekonomi serta keputusan politik suatu daerah. Sehingga secara keseluruhan akan membentuk struktur ruang yang sistematis terarah dan berkaitan secara fungsional sebagai refleksi spasial dari perkembangan atau pertumbuhan suatu wilayah. Adanya dua dasar kunci dalam pembentuk elemen spasial kota yakni dasar fisik suatu kota adalah perwujudan dari kenampakan berupa bangunan-bangunan, jalur jalan, dan benda-benda lain yang mempengaruhi bentuk kota tersebut, dan dasar ekonomi. (Catanesse dan Snyder dalam Hairudin, 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa dasar fisik dan dasar ekonomi merupakan elemen spasial yang ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu kota atau wilayah dimana terjadinya interaksi antar kawasan sebagai bagian dari suatu proses pembentukan karakter wilayah tersebut.

2.5. Pola Permukiman

Sasongko (2002) menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat dengan lingkungan akan membentuk organisasi ruang yang di dalamnya mengandung makna komposisi elemen-elemen pembentuk ruang dengan batasan tertentu. Komposisi ruang ini menunjukkan suatu pola tertentu

seperti square, rectangle, circle, atau oval. Setiap pola ini bukan hanya menunjukkan tatanan saja, akan tetapi juga memiliki rangka struktur pembentuk ruang dan di dalamnya mengandung makna *centres* dan *axes*.

Menurut Yudohusodo (1991), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan permukiman yang dapat dilihat dari 9 aspek, antara lain: letak geografis, kependudukan, sarana dan prasarana, ekonomi dan keterjangkauan daya beli, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, dan peran serta masyarakat.

1. Faktor geografi

Letak geografis suatu permukiman sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu kawasan. Permukiman yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau akan sangat lambat untuk berkembang. Topografi suatu kawasan juga berpengaruh, jika topografi kawasan tersebut tidak datar maka akan sulit bagi daerah tersebut untuk berkembang. Lingkungan alam dapat mempengaruhi kondisi permukiman, sehingga menambah kenyamanan penghuni permukiman.

2. Faktor Kependudukan

Perkembangan penduduk yang tinggi, merupakan permasalahan yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan permukiman. Jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya dan potensi bagi pembangunan, apabila dapat diarahkan menjadi manusia pembangunan yang efektif dan efisien. Tetapi sebaliknya, jumlah penduduk yang besar itu akan merupakan beban dan dapat menimbulkan permasalahan bila tidak diarahkan dengan baik. Disamping itu, penyebaran penduduk secara demografis yang tidak merata, merupakan permasalahan lain berpengaruh terhadap pembangunan perumahan.

3. Faktor Kelembagaan

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pembangunan perumahan adalah perangkat kelembagaan yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan, dan pelaksanaan baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, baik di pusat maupun di daerah

4. Faktor Swadaya dan Peran Serta Masyarakat

Dalam rangka membantu golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, menengah, tidak tetap, perlu dikembangkan pembangunan perumahan secara swadaya masyarakat yang dilakukan oleh berbagai organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap serta amat rendah dan tidak berkemampuan tersebut mampu membangun rumahnya sendiri dengan proses bertahap, yakni mula-mula dengan bahan bangunan bekas atau sederhana, kemudian lambat laun diperbaiki dengan bangunan permanen bahkan ada pula beberapa rumah yang sudah bertingkat. Faktor swadaya dan peran serta masyarakat atau aspek sosial tersebut juga meliputi kehidupan sosial masyarakat, kehidupan bertetangga, gotong royong dan pekerjaan bersama lainnya.

5. Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya merupakan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan permukiman. Sikap dan pandangan seseorang terhadap rumahnya, adat istiadat suatu daerah, kehidupan bertetangga, dan proses modernisasi merupakan faktor-faktor sosial budaya. Rumah tidak hanya sebagai tempat berteduh dan berlindung terhadap bahaya dari luar, tetapi berkembang menjadi sarana yang dapat menunjukkan citra dan jati diri penghuninya.

6. Ekonomi dan Keterjangkauan Daya Beli

Aspek ekonomi meliputi yang berkaitan dengan mata pencaharian. Tingkat perekonomian suatu daerah yang tinggi dapat meningkatkan perkembangan permukiman. Tingkat perekonomian suatu daerah akan mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin tinggi pula kemampuan orang tersebut dalam memiliki rumah. Hal ini akan meningkatkan perkembangan permukiman di suatu daerah. Keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap suatu rumah akan mempengaruhi perkembangan permukiman. Semakin murah harga suatu rumah di daerah tertentu, semakin banyak pula orang yang membeli rumah, maka semakin berkembanglah permukiman yang ada.

7. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana dari suatu perumahan dan permukiman dapat mempengaruhi perkembangan permukiman di suatu wilayah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat memudahkan penduduknya untuk beraktivitas sehari-hari. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang tersedia maka semakin banyak pula orang yang berkeinginan bertempat tinggal di daerah tersebut.

8. Pertanahan

Kenaikan harga lahan sebagai akibat penyediaan kelangkaan lahan untuk permukiman, menyebabkan timbulnya slum dan squatter.

9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan perkembangan perumahan dan permukiman. Dengan diciptakannya teknologi-teknologi baru dalam bidang jasa konstruksi dan bahan bangunan maka membuat pembangunan suatu rumah akan semakin cepat dan dapat menghemat waktu. Sehingga semakin banyak pula orang-orang yang ingin membangun rumahnya. Hal ini akan meningkatkan perkembangan permukiman.

2.6. Jalan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah Undang-undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:

a. Jalan Nasional

Merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

b. Jalan Provinsi

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi

c. Jalan Kabupaten

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

d. Jalan Kota

Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan Desa

Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokan jalan sesuai kelasnya adalah:

a. Jalan kelas I

yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200

(empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

b. Jalan kelas II

yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

c. Jalan kelas III

yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

d. Jalan kelas khusus

yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran Panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri dari 3 golongan yaitu:

a. Jalan arteri

Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

b. Jalan kolektor

Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

c. Jalan lokal

Jalan lokal yaitu Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Berdasarkan SNI 03-6981-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan jaringan jalan pada prasarana lingkungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Jalan

No	Klasifikasi jalan lokal	Lebar badan jalan minimum (m)	Lebar perkerasan jalan minimum (m)	Lebar bahu jalan minimum (m)
1	Jalan lokal sekunder			
	• Jalan setapak	2,00	1,20	0,25
	• Jalan kendaraan	3,50	3,00	0,50
2	Jalan lokal Sekunder II	5,00	4,50	0,50
3	Jalan kolektor Sekunder	7,00	5,00	0,50

2.7. Drainase

Dalam petunjuk teknis peraturan Menteri PU 12/PRT/M/2014, pengertian drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat. Sedangkan sistem drainase perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.

Sebagai salah satu sistem dalam perencanaan perkotaan, maka sistem drainase yang ada dikenal dengan istilah sistem drainase perkotaan. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Namun, secara praktis kita dapat

mengatakan bahwa drainase menangani kelebihan air sebelum masuk ke alur-alur besar atau sungai (Suripin, 2004).

Sampai saat ini perancangan drainase didasarkan pada filosofi bahwa air secepatnya mengalir dan seminimal mungkin menggenangi daerah layanan. Tapi dengan semakin timpangnya perimbangan air (pemakaian dan ketersediaan) maka diperlukan suatu perancangan drainase yang berfilosofi bukan saja aman terhadap genangan tapi juga sekaligus berasas pada konservasi air (Muttaqin, 2007). Bertolak dari hal tersebut, maka yang cocok diterapkan saat ini adalah sistem drainase yang berkelanjutan. Adapun konsep dasar pengembangan sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan adalah meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan konservasi lingkungan (Suripin, 2004). Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang komprehensif dan integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat struktural maupun non struktural. Disamping terjadi ketimpangan air, terjadi pula pencemaran air drainase oleh limbah cair dan padat (sampah) yang cukup berat sehingga penangan drainase harus terpadu dan berwawasan lingkungan (ecodrain).

Konsep Sistem Drainase yang berkelanjutan merupakan prioritas utama kegiatan dan harus ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan. Berdasarkan fungsinya, fasilitas penahan air hujan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu tipe penyimpanan dan tipe peresapan (Suripin, 2004).

2.8. Persampahan

Sampah akan menjadi beban bumi, artinya ada resiko-resiko yang akan ditimbulkannya (Hadi, 2005). Ketidakpedulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air (Alkadri dkk.1999) sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah

turunan lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk di perkotaan.

Sampah merupakan tantangan terbesar saat ini terutama untuk Indonesia yang secara statistik adalah penyumbang terbesar kedua di dunia. Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya berada di wilayah pesisir dan kebanyakan sampah ditemukan di tempat ini. Sampah yang berada di pesisir dapat berasal dari aktivitas manusia seperti wisatawan, buangan limbah dari rumah, dan bawaan dari sungai. Hasil kajian dari Handaka dkk (2007) yang dilakukan di pantai selatan Garut, tepatnya di Pantai Pameungpeuk Kabupaten Garut menunjukkan bahwa sekitar 65% sampah yang berada di pesisir pantai tersebut berasal dari wisatawan. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa sekitar 80% responden juga menyatakan bahwa kondisi pantai tersebut tidak bersih. Sebagai tambahan, Handaka dkk (2007) juga telah menunjukkan bahwa persepsi masyarakat cukup tinggi terhadap kebersihan pesisir sekitar, namun hal ini terkendala oleh fasilitas serta dukungan dari pemerintah setempat. Keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah akan sangat menunjang kebersihan pantai sehingga akan tercipta lingkungan pesisir pantai yang nyaman serta dapat menarik wisatawan.

Salah satu upaya yang diharapkan dapat mendukung kebersihan pesisir adalah adanya upaya pro-aktif dari elemen masyarakat. Saat ini, pengolahan sampah di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Pengangkutan dan penimbunan di TPA sebesar 69%; Dikubur 10%; Didaur ulang dan dikompos 7%; Dibakar 5%; Tidak terkelola 7%. Sampah plastik merupakan sampah yang paling sulit diuraikan oleh tanah. Pengolahan sampah dengan cara dibakar dapat menimbulkan masalah gangguan kesehatan bila asap hasil pembakaran terhirup. Salah satu upaya mengurangi dampak jumlah sampah plastik yaitu dengan cara melakukan pengolahan terhadap sampah plastik. Pengolahan terhadap sampah plastik tidak hanya akan mengurangi sampah plastik dan mendukung kebersihan lingkungan semata tetapi juga bisa menjadi peluang bisnis. Bahan baku sampah plastik jumlahnya akan melimpah seiring dengan produksi plastik yang meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk dan wisatawan. Setidaknya ada 2 cara pemanfaatan limbah plastik yaitu dengan pemakaian

kembali atau dengan daur ulang. Pemakaian kembali limbah plastik dilakukan dengan memanfaatkan limbah plastik untuk pemakaian kembali . Limbah plastik juga bisa dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan dengan memanfaatkan limbah plastik yang didaur ulang.

2.9. Mitigasi Bencana

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah. Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu:

a. Penilaian bahaya (*hazard assessment*)

Diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya.

b. Peringatan (*warning*)

Diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi,

dan sebagainya). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

c. *Persiapan (preparedness)*

Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

2.10. Tempat Parkir

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK. 105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, fasilitas parkir merupakan lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Jumlah penyediaan parkir disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi permintaan parkir termasuk pada periode puncak kunjungan untuk masing-masing kegiatan (Lisnawati 2014) namun kondisi tersebut tidak selalu terjadi dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan lahan, faktor biaya, atau adanya upaya pergerakan kendaraan (Young 2011).

Perhitungan kebutuhan ruang parkir dapat merujuk pada penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

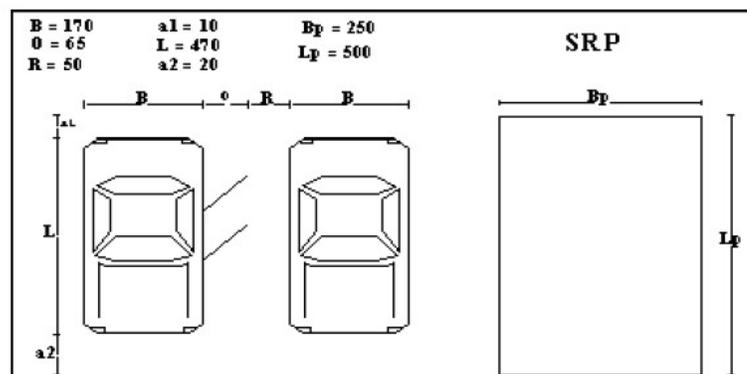
Perhubungan Darat Nomor: 272/HK. 105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Besaran satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

No	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (M ²)
1	Mobil Penumpang untuk Golongan I	2,30 x 5,00
	Mobil Penumpang untuk Golongan II	2,50 x 5,00
	Mobil Penumpang untuk Golongan III	3,00 x 5,00
2	Bus / Truk	3,40 x 12,50
3	Sepeda Motor	0,75 x 2,00

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Sedangkan bagian berikut akan memaparkan mengenai pendetailan satuan ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan. Gambar di bawah ini akan memaparkan mengenai satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan mmobil penumpang untuk golongan I, golongan II, dan golongan III



Gambar 1. Satuan ruang parkir (SRP) untuk mobil penumpang (dalam cm)

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Keterangan:

B = lebar total kendaraan
 O = lebar bukaan pintu
 R = jarak bebas arah lateral

L = Panjang total kendaraan
 a₁, a₂ = jarak bebas arah longitudinal

Gol I:

$$\begin{array}{lll} B = 170 & a_1 = 10 & B_p = 230 = B + O + R \\ O = 55 & L = 470 & L_p = 500 = L + a_1 + a_2 \\ R = 50 & a_2 = 20 & \end{array}$$

Gol II:

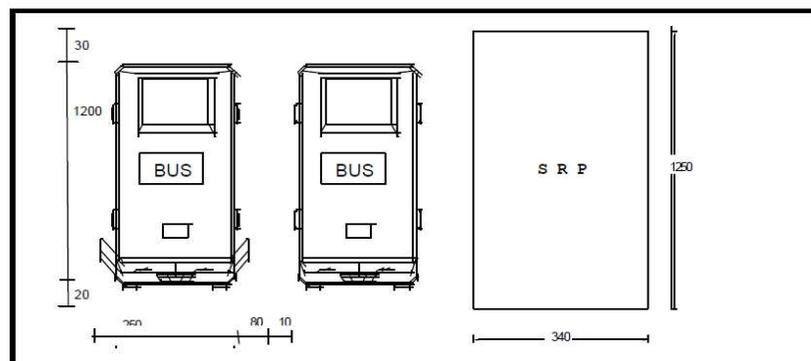
$$\begin{array}{lll} B = 170 & a_1 = 10 & B_p = 250 = B + O + R \\ O = 75 & L = 470 & L_p = 500 = L + a_1 + a_2 \\ R = 50 & a_2 = 20 & \end{array}$$

Gol III:

$$\begin{array}{lll} B = 170 & a_1 = 10 & B_p = 300 = B + O + R \\ O = 80 & L = 470 & L_p = 500 = L + a_1 + a_2 \\ R = 50 & a_2 = 20 & \end{array}$$

Berdasarkan pemaparan satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan mobil penumpang untuk golongan I, golongan II, dan golongan III di atas, dapat diketahui bahwa luasan minimum satuan ruang parkir untuk masing-masing jenis kendaraan mobil penumpang golongan I, golongan II, dan golongan III adalah $11,50 \text{ M}^2$, $12,50 \text{ M}^2$, dan 15 M^2 .

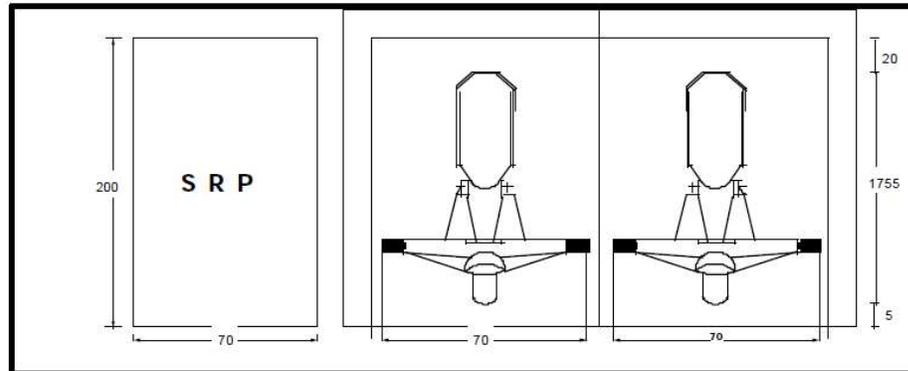
Sedangkan berikut merupakan gambaran mengenai satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan bus/truk



Gambar 2. Satuan ruang parkir (SRP) untuk bus/truk (dalam cm)

Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Berdasarkan pemaparan satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan bus/truk di atas, dapat diketahui bahwa luasan minimum satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan bus/truk adalah $42,50 \text{ M}^2$. Kemudian berikut merupakan gambaran mengenai jenis kendaraan sepeda motor



Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Gambar 3. Satuan ruang parkir (SRP) untuk sepeda motor (dalam cm)

Berdasarkan pemaparan satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan sepeda motor di atas, dapat diketahui bahwa luasan minimum satuan ruang parkir untuk jenis kendaraan sepeda motor adalah $1,50 \text{ M}^2$. Kemudian berikut merupakan gambaran mengenai jenis kendaraan sepeda motor

2.11. Penduduk

Menurut Yusuf (2000), pendekatan demografi adalah suatu pendekatan yang mempelajari penduduk dengan mempelajari tentang jumlahnya, ciri-cirinya seperti umur dan jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan pekerjaan, serta distribusi tempat tinggalnya. Selanjutnya, perubahan jumlah, ciri serta distribusi tersebut dapat disebabkan oleh perubahan kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Pendekatan kependudukan berarti mempelajari penduduk terkait dengan kebutuhan hidupnya seperti penduduk dengan pangan dan sandang, penduduk dengan pemukiman, penduduk dengan pendidikan dan pekerjaan, penduduk dengan kesehatan, dan masalah lingkungan Yusuf (2000). Pada umumnya, pemahaman terkait dengan kependudukan diperlukan pengetahuan demografi. Pengetahuan demografi ini diperoleh dari informasi melalui sensus, registrasi vital, dan survei penduduk.

2.12. Budaya

Bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau system kognitif yang berfungsi sebagai "pedoman kehidupan", referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989). Setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak, kebudayaan itu akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Kebudayaan haruslah membantu kemampuan survival masyarakat atau penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya. Sebagai suatu pedoman untuk bertindak bagi warga masyarakat, isi kebudayaan adalah rumusan dari tujuan-tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, yang disepakati secara sosial Kluckhohn (1984).

2.13. Mata Pencaharian

Sebelum mengenal lebih jauh mengenai tentang konsep mata pencaharian, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu dari segi arti sistem mata pencaharian itu sendiri, berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mata pencaharian terdiri dari dua unsur yaitu sistem dan mata pencaharian. Sistem memiliki tiga pengertian pertama, sekelompok bagian (alat, dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Kedua, yaitu sekelompok dari pendapatan peristiwa, kepercayaan dan lain sebagainya. Ketiga, cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan mata pencaharian, berarti pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan (sumbu atau pokok) pekerjaan atau pencaharian yang dikerjakan sehari-hari. Misalnya mata pencaharian penduduk desa tersebut nelayan dan petani. Dengan kata lain sistem mata pencaharian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sehari-hari dan menjadi pokok penghidupan baginya.

H. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata

Menurut Sasrawati (2003) dalam Pratama et al. (2016) definisi prinsip pengembangan kawasan wisata adalah merupakan dasar-dasar penataan kawasan yang memasukkan aspek yang perlu dipertimbangkan dan komponen penataan kawasan wisata. Beberapa aspek yang terkait dalam pengembangan kawasan wisata adalah:

1. Citra (*image*), yaitu pandangan secara fisik (*viewer exposure*) atau dengan merasakan (*viewer sensitivity*). Pandangan secara fisik berkaitan dengan jarak, elevasi dan pergerakan pandangan. Sedangkan pandangan yang melibatkan kepekaan perasaan tergantung pada sudut pandang, seperti karakter manusia, pendapat, pengalaman dan kesan yang ditimbulkan pada kawasan. Serta memiliki tema pengembangan, yaitu membentuk tema kawasan wisata yang mempunyai kekhasan yang membedakan dengan kawasan wisata lainnya. Tema dapat berkaitan dengan kekhasan ekologi, klim, sejarah atau sosial budaya setempat.
2. Keteraturan, yaitu penataan kawasan yang baik dan teratur didukung desain interior dan eksterior yang menarik dengan pembagian fungsi yang jelas.
3. Bangunan, yaitu orientasi bangunan yang sebaiknya ke arah pemandangan pegunungan. Ketinggian bangunan tidak menghalangi pandangan ke pemandangan pegunungan sehingga memberikan kesempatan bagi penduduk untuk menikmati pemandangan alam atau tidak mengacaukan garis langit (*skyline*).
4. Keselamatan (*safety*), yaitu bertujuan untuk melindungi penduduk dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya musibah, seperti penataan yang dapat menimbulkan kecelakaan dan konflik.
5. Keamanan (*security*), yaitu bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penduduk dalam beraktivitas di kawasan atau kota seperti penataan kota yang mencegah terjadinya gangguan kejahatan/kriminal.
6. *Pedestrian Ways* yaitu bertujuan memberikan kemudahan berjalan mencapai dan menyusuri kawasan wisata sehingga tidak melelahkan, menghubungkan ruang-ruang publik, dan memberikan rasa senang untuk berjalan.

Atribut-atribut pengembangan di atas akan masuk dalam bagian aspek prasarana dan sarana produk wisata. Sehingga dalam aspek prasarana dan

sarana terbagi dalam 3 kriteria yaitu kriteria sarana wisata, transportasi dan perancangan.

Dalam fenomena saat ini terjadi pergeseran pasar wisata ditunjukkan oleh adanya pergeseran orientasi pengembangan produk wisata. Konsep pengembangan wisata sebelumnya berorientasi pada pengembangan produk wisata massal (*mass tourism*) yaitu pengembangan skala besar pada budaya korporasi (*corporate culture*) secara multinasional. Pengembangan produk berorientasi pada volume dan target kuantitatif, serta berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Saat ini orientasi produk wisata menuju konsep produk wisata yang berkualitas (*quality tourism*).

Menurut Gunn (1994) dalam Pratama et al.(2016) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek yaitu:

1. Mempertahankan kelestarian lingkungannya
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
3. Menjamin kepuasan pengunjung
4. Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat disekitar kawasan dan zone pengembangannya.

Disamping keempat aspek diatas, kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial akan lebih bermakna, tergantung pada dimana lokasi pengembangan wisata berada.

I. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (sustainable tourism development)

2.14. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara

keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi.

Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu:

- 1) Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
- 2) Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong bididaya pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
- 4) Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan Pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
- 6) Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
- 7) Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
- 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
- 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
- 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- 13) Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
- 15) Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- 16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ambisi negara-negara anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang

telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Untuk selanjutnya ke tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* di atas dikelompokkan sebagai 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial; terdiri dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5;
2. Pilar pembangunan ekonomi; terdiri dari tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17;
3. Pilar pembangunan lingkungan; terdiri dari tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15; dan
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu tujuan 16.

2.15. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller dalam Pitana (2005) adalah pariwisata yang dikelola mengacu pada pertumbuhan kualitatif, maksudnya adalah meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan kesehatan masyarakat. Ada beberapa prinsip dalam pariwisata berkelanjutan menurut Muller, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang sehat
2. Kesejahteraan masyarakat lokal
3. Tidak merubah struktur alam, dan melindungi sumber daya alam
4. Kebudayaan masyarakat yang tumbuh secara sehat

Memaksimalkan kepuasan wisatawan dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan

Dalam pelaksanaannya, pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa prinsip utama, yaitu lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi. Berikut penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut:

1. Lingkungan

Pada aspek lingkungan, pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan keberadaan sumber daya lingkungan dengan menjaga

keanekaragaman hayati, warisan alam, dan ekologi yang ada di suatu destinasi wisata.

2. Sosial

Pada aspek sosial, pariwisata berkelanjutan harus turut serta melestarikan adat istiadat maupun warisan budaya yang ada di masyarakat.

3. Ekonomi

Di sisi ekonomi, pariwisata berkelanjutan harus mampu berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan pada sisi ekonomi memiliki prinsip meningkatkan keuntungan bisnis sebagai contoh penjualan tiket masuk kawasan wisata yang bisa meningkatkan pendapatan daerah, pengeluaran pengunjung dengan cara menyediakan kebutuhan wisatawan seperti penginapan, oleh-oleh maupun makanan. Selain itu, juga dapat membuka lapangan pekerjaan dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengelola atau memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk terlibat secara langsung.

2.16. Aspek Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Sulistyadi et al. (2019) pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicapai dengan menyeimbangkan ketiga elemen utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Prinsip umum dalam pariwisata berkelanjutan yaitu:

1. Menyeimbangkan pemanfaatan lingkungan dengan manfaat ekonomis dari kepariwisataan.
2. Menyeimbangkan pemanfaatan sumberdaya lingkungan dengan perubahan nilai sosial dan masyarakat lokal yang disebabkan oleh penggunaan sumberdaya lingkungan, dan
3. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan dampak pertumbuhan ekonomi pada nilai sosial dan masyarakat lokal.

2.16.1. Aspek Ekonomi

Pengembangan destinasi wisata berupaya untuk memanfaatkan dan menjual potensi alam dan budaya yang masih asli (nature), serta merupakan industri pariwisata yang cenderung berkembang dengan pesat seiring dengan meningkatnya kecenderungan minat masyarakat untuk menikmati alam lingkungannya (back to nature), kemajuan dan kemudahan akses mencapai lokasi obyek pariwisata, dan meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat setempat.

Pariwisata sebagai mata rantai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga merupakan sebagai salah satu yang dipercaya mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya lapangan kerja baru, sumber pendapatan bagi masyarakat, aktivitas jasa industry pariwisata yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi pada daerah-daerah sekitar yang belum berkembang dan tersentuh pembangunan. Dari beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di beberapa lokasi dan wilayah dapat memberikan dampak positif dari aspek ekonomi kepada masyarakat sekitar. Bahkan menunjukkan kecenderungan mampu menaikkan tingkat pendapatan masyarakat lokal.

Potensi sumber daya alam sebagai aset berupa flora, fauna, ekosistem, fenomena alam dan kehidupan budaya masyarakat sekitar yang sangat unik, khas, orisinal (nature), beragam dan potensial, memiliki daya tarik sebagai obyek wisata. Namun ekosistem lingkungan alam yang menjadi daya tarik tersebut, juga potensial dan sensitif untuk mudah rusak apabila di dalam pelaksanaan pengelolannya tidak mengacu pada aturan dan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang harus di terapkan.

2.16.2. Aspek Lingkungan

Kawasan-kawasan wisata alam selalu memiliki potensi sumberdaya alam berupa flora, fauna, ekosistem, fenomena alam dan

budaya masyarakat sekitar yang sangat unik, khas, orisinal, beragam, dan potensial memiliki daya tarik sebagai obyek dan tujuan pariwisata.

Potensi pariwisata diatas merupakan peluang industri pariwisata yang menciptakan pengembangan pemanfaatan dari potensi daya tarik alam lingkungan dan budaya di destinasi, disamping merupakan tantangan di dalam keterpaduan pemanfaatan dan konservasi secara berkelanjutan, sehingga mampu mengendalikan kemungkinan kerusakan dan menurunnya potensi daya tarik obyek wisata kerusakan dan penurunan kualitas potensi daya tarik alam lingkungan dan budaya tersebut merupakan ancaman potensial bagi kelangsungan dan keberlanjutan wisata dalam suatu kawasan dituntut mampu mengidentifikasi dan memahami potensi daya tarik obyek pariwisata, kemampuan daya dukung alam lingkungan, dan gangguan yang memungkinkan mempengaruhi proses-proses ekologi terpenting.

Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di wilayahnya dengan tidak dengan secara gegabah memutuskan hal-hal terkait dengan perkembangan destinasi wisata yang bersifat instan. Namun secara bijak dapat memutuskan pengembangan pariwisata yang dilandaskan pada keterpaduan pemanfaatan dan konservasi secara berkelanjutan dan serta mampu untuk mengendalikan kemungkinan kerusakan dan menurunnya daya tarik obyek wisata. Kondisi seperti ini akan membawa dampak pada penurunan kualitas tidak saja pada potensi alam dan potensi daya tarik lingkungan alam sebagai objek, tetapi juga pada kelangsungan dan keberlanjutan industri wisata itu sendiri. Oleh karenanya, pengelolaan potensi alam pada suatu kawasan yang rentan seperti gugusan pulau di destinasi wisata dituntut untuk mampu mengidentifikasi potensi yang dapat menjadi daya tarik, serta memahami berbagai indikator dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat penyelenggaraan kepariwisataan.

Dibeberapa kawasan wisata di Indonesia, kaitan antara kepentingan aspek konservasi dan aspek pendayagunaan potensi obyek wisata, belum mampu digambarkan secara lengkap dan menyeluruh. Identifikasi atau penyajian informasi yang berkaitan

dengan kemampuan daya dukung, sensitifitas dan kerentanan spesies kehidupan liar dan habitat alam lingkungan, dan gangguan-gangguan yang kemungkinan mempengaruhi proses-proses ekologi terpenting, perlu dilakukan sebagai dasar dalam menetapkan variasi daya tarik wisatawan, disamping hasil identifikasi ini merupakan juga dasar terpenting dari aspek konservasi alam pada pengembangan pariwisata. Keberhasilan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menginterpretasikan lingkungan alam sebagai potensi daya tarik obyek wisata.

Kemampuan interpretasi lingkungan alam tidak hanya saja akan berpeluang untuk menarik dan memiliki nilai jual tinggi, tetapi tidak juga dapat menjadi bahan masukan utama pendidikan yang harus dapat memberikan pengetahuan dan merubah perilaku wisatawan dalam menyikapi konservasi alam dan lingkungan. Infrastruktur dan sarana pengunjung seperti pusat informasi, tempat akomodasi, papan petunjuk, papan informasi pengunjung di suatu daerah tujuan pariwisata cenderung harus memperhatikan penggunaan bahan ramah lingkungan serta jelas dan lengkap.

2.16.3. Aspek Sosial

Dampak pariwisata terhadap situasi sosial dan budaya masyarakat lokal lokal tidak boleh diabaikan. Dampaknya bias bersifat positif maupun bersifat negatif. Pendekatan pariwisata berkelanjutan dirancang untuk mendorong terjadinya dampak positif pembangunan pariwisata terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat, dan mengenali serta mengelola setiap dampak negatifnya. Pembangunan pariwisata mungkin akan meningkatkan degradasi budaya dan mengundang timbulnya kriminalitas, terutama terkait dengan obat-obatan terlarang dan prostitusi. Permasalahan juga mungkin timbul, bila masyarakat setempat harus memperjuangkan sumberdayanya sendiri dan terasing dari kenyamanan yang dinikmati wisatawan dan juga oleh kelakuan wisatawan tak sesuai dengan nilai-nilai setempat.

Pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata menawarkan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan menempatkan budaya lokal sebagai bagian atau bahkan menjadi inti produk pariwisata. Dengan menambahkan pendekatan keberlanjutan dalam pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan, komunikasi, penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran budaya, kerjasama dan kedamaian dapat tercapai. Pada saat yang sama juga mungkin akan diperoleh kebanggaan yang lebih kuat terhadap budaya lokal dan juga revitalisasi tradisi. Ketika masyarakat diperkuat toleransinya dan rasa hormatnya terhadap tamu tamu mereka, tidak kurang pula pentingnya pendidikan bagi wisatawan yang ditujukan agar mereka menghormati budaya lokal tuan rumah dan semua atributnya.

Pariwisata berkelanjutan juga berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi kemakmuran destinasi dan masyarakat lokalnya. Pngaruh terhadap kepedulian masyarakat lokal terhadap lingkungannya akan memperkuat aktivitas budaya yang selanjutnya akan kembali berdampak positif baik kepada penduduk lokal maupun terhadap wisatawan. Implementasi pariwisata berkelanjutan bukanlah suatu yang sederhana untuk dilakukan, diperlukan pemberdayaan masyarakat lokal yang berkesinambungan melalui pendidikan, komunikasi, dan persuasi yang positif agar supaya terjadi penguatan toleransi dan rasa hormat, pertukaran sosial budaya, kerjasama dan perdamaian dapat tercapai. Pada saat yang sama kebanggaan yang lebih kuat dalam budaya lokal dan juga revitalisasi tradisi diharapkan dapat menjadi prioritas utama juga.

2.17. Acuan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis keberlanjutan ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) terdiri dari:

1) Pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, dengan ide yang melibatkan masyarakat lokal juga dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Mestinya juga melibatkan masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal akan mempunyai rasa memiliki untuk peduli, bertanggung jawab, komitmen, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya terhadap keberlanjutan pariwisata dimasa sekarang sampai untuk dimasa yang akan datang. Dan pemerintah juga harus dapat menangkap peluang dengan cara memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan, memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata dan juga dapat mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya lingkungan daerah tujuan tersebut. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan membuka lapangan kerja.

2) Menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Keseimbangan tersebut akan dapat terwujud jika semua pihak dapat bekerjasama dalam satu tujuan sebagai sebuah komunitas yang solid. Komunitas yang dimaksud adalah masyarakat lokal, pemerintah lokal, industri pariwisata, dan organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di mana destinasi pariwisata dikembangkan. Maksudnya adalah dengan adanya atas dasar musyawarah dan permufakatan masyarakat setempat dengan adanya tersebut dapat menghasilkan dampak positif yaitu dapat membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaannya, terjalinnya komunikasi yang baik antara industry pariwisata, pemerintah dan masyarakat sehingga akan terciptanya pariwisata berkelanjutan sesuai yang direncanakan.

3) Pembangunan pariwisata harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan dengan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik. Serta harus dapat menampung pendapat organisasi masyarakat lokal, melibatkan kelompok masyarakat miskin, kaum perempuan, asosiasi pariwisata, dan kelompok lainnya dalam masyarakat yang berpotensi mempengaruhi jalannya pembangunan.

- 4) Memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin dengan itu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha dan mengajarkan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi dalam kegiatannya mengikuti tujuan pariwisata itu sendiri tanpa mengorbankan alam atau apapun.
- 5) Pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat, artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sector lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini.
- 6) Adanya kerjasama antara masyarakat lokal sebagai creator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara satu sama lain dengan itu menekan tingkat kebocoran pendapatan pemerintah dan dapatb meningkatkan pendapatan pemerintah maupun pelaku yang melakukan kegiatan itu sendiri.
- 7) Pembangunan pariwisata harus dapat memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang – undangan baik tingkat nasional maupun internasional sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Dan juga membentuk kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.
- 8) Pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. Karena anggapan bahwa pembangunan pariwisata berpotensi merusak lingkungan adalah sesuatu yang logis, jika dihubungkan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan degradasi daerah tujuan pariwisata tersebut.
- 9) Pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi.
- 10) Harus ada monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep

pembangunan berkelanjutan, dengan menggunakan prinsip pengelolaan manajemen kapasitas, baik kapasitas wilayah, kapasitas obyek wisata tertentu, kapasitas ekonomi, kapasitas sosial, dan kapasitas sumber daya yang lainnya sehingga pembangunan pariwisata dapat terus berkelanjutan.

11) Harus ada keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumber daya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah gunakan.

12) Melakukan program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata agar para pekerja ahli dalam bidangnya masing-masing.

13) Terwujudnya tiga kualitas, yakni pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup "quality of life" masyarakat lokal, pada sisi yang lainnya pariwisata harus mampu memberikan kualitas berusaha "quality of opportunity" kepada para penyedia jasa dalam industri pariwisata dan sisi berikutnya dan menjadi yang terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman wisatawan "quality of experience"

2.18. Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pengembangan berkelanjutan dirumuskan oleh The world Commission for environmental and development(WCED), yakni komisi dunia untuk lingkungan serta pembangunan, yang didirikan oleh Majelis Umum PBB. Batasanya merupakan sebagai pembangunan yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuannya adalah memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang strategis hingga kepada pelaksanaannya di lapangan.(Pratama et al. 2016)

Khususnya diwilayah alam, pariwisata dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama. Bila suatu wilayah alami yang dibangun untuk rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga berkembang pesat. Secara strategis pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat dikembangkan dan diwaspadai dampaknya dengan

memasukkan rencana manajemen lingkungan dan pemantauannya kedalam suatu rencana terpadu (*integrated*) dan pelaksanaannya yang kemudian dimasukkan dalam tahap perencanaan pariwisata itu. Budaya (*Cultural*) dan aspek fisik (*Physical aspect*) merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu Kawasan wisata alam.

Partisipasi lokal memberikan peluang efektif dalam kegiatan pembangunan, hal ini berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran sosial dan bukan subjek pasif untuk mengelola sumberdaya tetapi juga membuat keputusan dan control pada kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Juga perlunya interaksi ketiga pihak yang ikut terlibat, yaitu sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat.

Terdapat beberapa indikator dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, diantaranya:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Kepuasan masyarakat lokal
3. Kemudahan akses menuju daya tarik wisata
4. Terkendalinya dampak negative
5. Pelestarian pustaka budaya dan alam
6. Terdapatnya partisipasi masyarakat
7. Kepuasan wisatawan
8. Kesehatan dan keselamatan umum
9. Memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah
10. Menciptakan lapangan kerja

Pariwisata adalah industri yang berkelangsungan hidupnya sangatlah ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Pariwisata sangat peka terhadap kerusakan lingkungan, tanpa dukungan lingkungan yang baik perkembangan industri pariwisata akan berjalan lambat dan sulit, sebab dalam industri pariwisata lingkungan itulah yang sebenarnya dijual. Pada pengembangan pariwisata, atau pengelolaan lingkungan untuk melestarikan kemampuan lingkungan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan bukanlah hal yang abstrak, tetapi hal yang nyata dan mutlak karena sering mempunyai efek jangka pendek.

Pembangunan kawasan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya secara berkelanjutan.

Menurut Sukma (2014) pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya Tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan Para Pelaku/*Stakeholder Involvement*

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku

bisnis/wirausaha setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat local harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria- kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi Tujuan-tujuan masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (limits of acceptable use).

7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak

kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program- program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik- topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

J. Kriteria Kawasan Wisata

Suatu kawasan dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata apabila memiliki kriteria-kriteria dan faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Potensi Produk/Obyek Dan Daya Tarik Wisata Unik Dan Khas.

Memiliki potensi/produk daya Tarik unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya Tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, budaya).

Potensi obyek dan daya Tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu Kawasan menjadi Kawasan wisata.

Potensi kawasan wisata tersebut dapat berupa:

- a. Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentangalam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur bangunan yang unik dan khas, dan sebagainya).
- b. Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional, dan sebagainya).

2. Tingkat Penerimaan Dan Komitmen Yang Kuat Dari Masyarakat Setempat

Tingkat penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan; yaitu adanya sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap kegiatan pariwisata sebagai bentuk kegiatan yang akan menciptakan interaksi antara masyarakat lokal (sebagai tuan rumah/host) dengan wisatawan (sebagai tamu/guest) untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan, khususnya bagi masyarakat lokal adalah bagi penghargaan dan pelestarian budaya setempat dan manfaat ekonomi kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan bagi wisatawan adalah pengkayaan wawasan melalui pengenalan budaya lokal. Untuk itu perlu adanya semangat dan motivasi yang kuat dari masyarakat dalam menjaga karakter yang khas dari lingkungan fisik alam Kawasan dan kehidupan budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat. Hal tersebut juga merupakan factor yang sangat mendasar, karena komitmen atau motivasi tersebut sesungguhnya yang akan menjamin kelangsungan daya Tarik dan kelestarian sumber daya wisata yang dimiliki Kawasan tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terjaga maka modal dasar yang menjadi daya Tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung ke Kawasan tersebut akan hilang, dan kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali. Oleh karena itu kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan Kawasan menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan Kawasan wisata.

3. Potensi Sumber Daya Manusia Lokal Yang Mendukung

Memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan kawasan wisata. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena pengembangan kawasan

wisata dimaksudkan untuk memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian dampak positif pengembangan pariwisata di kawasan tersebut akan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat, dan bukannya pihak lain.

4. Peluang Akses Terhadap Pasar Wisatawan

Potensi dasar yang dimiliki oleh suatu kawasan untuk menjadi kawasan wisata selanjutnya perlu didukung dengan faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu kawasan yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai Kawasan wisata tidak ada artinya manakala tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar/wisatawan. Oleh karena itu kesiapan kawasan wisata harus diimbangi dengan kemampuan untuk membangun jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata, dengan berbagi bentuk kerjasama dan pengembangan media promosi sehingga potensi kawasan tersebut muncul dalam peta produk dan pemaketan wisata di daerah, regional, nasional maupun internasional. Sehingga dapat dijaring peluang kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut.

5. Ketersediaan Area/Ruang untuk Pengembangan Fasilitas Pendukung Wisata
- Memiliki alokasi ruang/area untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata kawasan, seperti : akomodasi/homestay, area pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktifitas wisata kawasan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan lain sebagainya. (Noor 2018)

K. Tipologi Kawasan Wisata

Tipologi Kawasan wisata didasarkan atas karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimilikinya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat, artefak budaya, dan sebagainya) sebagai daya Tarik wisata utama yaitu kawasan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan

kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat Kawasan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.

2. Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya Tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pesisir pantai, dan sebagainya)

Yaitu wilayah Kawasan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga Kawasan tersebut memiliki potensi keindahan view dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.

3. Kawasan wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya, budaya dan alam sebagai daya Tarik utama

Yaitu wilayah kawasan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/lansekap).

4. Kawasan wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif (industry kerajinan, dsb) sebagai daya Tarik wisata utama. Yaitu wilayah Kawasan yang memiliki keunikan dan daya Tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktifitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industry rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan maupun aktifitas kesenian yang khas (Noor 2018).

L. Hasil Penelitian Terdahulu

Besra (2012) melakukan penelitian tentang Potensi Wisata Kuliner Dalam Mendukung Pariwisata Di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi jenis-jenis dan potensi kuliner khas minang yang ada di daerah Kota Padang Sumatera Barat serta mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan kuliner khas Minang dalam menunjang potensi pariwisata di Kota Padang Sumatera Barat. Dalam penelitian menggunakan metode survey yaitu penelitian ini mengambil sampel dari populasi dengan melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data utamanya. Metode survey yang diterapkan yaitu *descriptive survey*. Penelitian ini berdasarkan pada kajian pustaka, informasi dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan penelitian lapangan. Unit analisis yang

digunakan adalah pelaku bisnis makanan tradisional yang berdomisili di Kota Padang. Unit observasi pada penelitian ini adalah pelaku dan pengelola bisnis makanan tradisional di Kota Padang.

García-Melón, Gómez-Navarro, and Acuña-Dutra (2012) melakukan penelitian tentang Evaluasi Strategi Pariwisata Berkelanjutan yang dipromosikan oleh pemangku kepentingan terkait Taman Nasional (National Park) adalah perhatian utama untuk manajer National Park. Untuk membantu mereka dalam evaluasi prosedur strategis mereka, dengan menggunakan metodologi berdasarkan Analytic Network Process dan prosedur penghakiman tipe-Delphi. Itu pendekatan bertujuan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan partisipatif dan konsensus. Metodologi ini diterapkan pada Los Roques NP di Venezuela. Permasalahannya adalah tiga strategi pariwisata lestari yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan: resort hemat energi, kegiatan rekreasi ramah lingkungan dan ekologis sistem transportasi. Perwakilan dari delapan pemangku kepentingan berpartisipasi dalam metodologi tersebut 13 kriteria keberlanjutan dipilih. Di Iran Heidari Majid et al (2014) meneliti tentang perkembangan industri pariwisata di Pulau Kish di negara Iran dengan menggunakan metode analisis SWOT dan metode ANP (analytical network process). Analisis ini dilakukan dengan fokus pada kelompok pariwisata khususnya para ahli kebijakan dan perencanaan keputusan manajemen strategis di industri pariwisata Iran

Fajriah (2014) melakukan penelitian pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan (studi kasus Kawasan pesisir pantai wonokerto Kabupaten Pekalongan). Tujuan dari penelitian ini mengkaji pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan di kawasan pesisir Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian menggunakan metode komparatif dalam menganalisis jumlah sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang ada dipantai Wonokerto kabupaten Pekalongan, Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting sarana dan prasarana yang akan dianalisis yang meliputi daya tarik/atraksi, aksesibilitas, transportasi, pelayanan, informasi, kenyamanan dan keamanan. Setelah itu dalam penelitian ini melakukan metode analisis triangulasi. pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Setelah itu dalam penelitian ini melakukan metode analisis triangulasi. pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sampel yang menjadi subjek populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpengaruh dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan sebagai narasumber antara lain Pemerintah, wisatawan dan pelaku usaha yang ada pada Kawasan wisata Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

Morteza et al. (2016) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Iran untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk membangun pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir. Strategi utama untuk pencapaian tujuan tersebut adalah dengan mendorong kegiatan ekonomi di wilayah pesisir yang sejalan dengan kapasitas lingkungan serta menentukan lokasi wisata yang optimal di antara berbagai alternatif pariwisata berdasarkan strategi ICZM. Dengan mengembangkan model evaluasi berdasarkan proses jaringan analitik (ANP) dan teknik untuk kinerja pesanan oleh kesamaan dengan solusi ideal (TOPSIS), untuk membantu investor dalam industri pariwisata, pemilihan lokasi pariwisata yang optimal di Pesisir Terpadu Zone Management dalam lingkungan fuzzy, dimana ketidakjelasan dan subjektivitas diparameterkan dengan bilangan fuzzy segitiga. ANP digunakan untuk menganalisis struktur masalah pemilihan lokasi pariwisata dan menentukan bobot kriteria, sedangkan metode Fuzzy TOPSIS digunakan untuk mendapatkan prioritas akhir. Untuk kenyamanan dan ketepatan dalam menghitung bobot relatif kriteria, perangkat lunak Super Decisions digunakan.

Noor (2018) melakukan penelitian Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Karimunjawa yang Berkelanjutan (Sustainability Tourism) ini dilakukan dengan melihat konsep Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sehingga terdapat 4 pilar pembangunan pariwisata, yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata, agar tercapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan menggunakan metode analisa ekonomi, metode analytical network process (ANP) dan metode SWOT untuk menentukan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Karimunjawa. Output dari penelitian ini nantinya berupa Roadmap Strategi Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Karimunjawa

dengan menggunakan metode teknik industri analisa SWOT, metode ANP, analisa ekonomi dan analisa kesenjangan.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Potensi wisata kuliner dalam mendukung pariwisata di Kota Padang	Eri Besra (2012)	1) Mengidentifikasi jenis-jenis dan potensi kuliner khas Minang yang ada di daerah Kota Padang Sumatera Barat 2) Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan kuliner khas Minang dalam menunjang potensi pariwisata di Kota Padang Sumatera Barat.	Deskriptif Kualitatif	1) Banyak wisata kuliner Kota Padang yang dapat diidentifikasi, sehingga menyediakan informasi tentang wisata kuliner Kota Padang 2) Diperlukan strategi pemasaran yang lebih cocok untuk memasarkan jasa kuliner Kota Padang dan dukungan banyak pihak terutama Pemerintah Kota Padang dan Perguruan Tinggi.
<p>Perbedaanya: Penelitian ini bertujuan Mendapatkan gambaran mengenai pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan dengan menggunakan Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis SWOT</p>					
2	A combined ANP-delphi approach to evaluate sustainable tourism “Pendekatan gabungan ANP-delphi untuk mengevaluasi pariwisata berkelanjutan”	Mónica García-Melón, Tomás Gómez-Navarro, Silvia Acuña-Dutra (2012)	melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan partisipatif dan konsensus	Metode ANP (analytical network process)	Memberikan beberapa wawasan penting ke dalam filosofi keseluruhan dan konsepsi peserta yang mendasari tentang apa arti pembangunan berkelanjutan dari

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
					Taman Nasional Los Roques
Perbedaanya: Penelitian ini bertujuan Mendapatkan gambaran mengenai pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan dengan menggunakan Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis SWOT					
3	Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan (Studi kasus: Kawasan pesisir pantai Mojokerto Kabupaten Pekalongan)	Syarifah Dina Fajriah, Mussadun (2014)	Mengkaji pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan di kawasan pesisir Wonokerto Kabupaten Pekalongan	Metode komparatif	Kawasan pesisir pantai Wonokerto memiliki banyak potensi tetapi sarana dan prasarana pendukung aktifitas wisata masih membutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya.
Perbedaanya: Penelitian ini bertujuan Mendapatkan gambaran mengenai pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan dengan menggunakan Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis SWOT					
4	Selection of the optimal tourism site using the ANP and fuzzy TOPSIS in the framework of Integrated Coastal Zone Management: A case of Qeshm Island "Pemilihan lokasi wisata yang optimal menggunakan ANP dan fuzzy TOPSIS Dalam Rangka Pengelolaan Wilayah Pesisir	Morteza et al (2016)	Untuk membangun pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir. Strategi utama untuk pencapaian tujuan tersebut adalah dengan mendorong kegiatan ekonomi di wilayah pesisir yang sejalan dengan kapasitas lingkungan	Metode Fuzzy TOPSIS	Hutan bakau di pulau Qeshm dipilih sebagai lokasi wisata yang paling nyaman dalam pengembangan manajemen terpadu. Zona ini memiliki nilai rekreasi yang tinggi, habitat pesisir yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi dan keberadaan berbagai macam spesies air.

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
	Terpadu: Kasus: Pulau Qeshm “				
Perbedaanya: Penelitian ini bertujuan Mendapatkan gambaran mengenai pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan dengan menggunakan Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis SWOT					
5	Analisis perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa yang berkelanjutan (Sustainability Tourism) (Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara)	Noor Nailie Azzat (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan urutan prioritas perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa berdasarkan dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 2) Merencanakan strategi pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa yang berkelanjutan (sustainability tourism) dengan menentukan prioritas dari alternatif-alternatif perencanaan pengembangan kawasan pariwisata berdasarkan aspek ekonomi dan aspek hukum dan lingkungan 	metode analisis SWOT dan metode ANP (analytical network process)	<ol style="list-style-type: none"> 1) analisa Analytical Network Process (ANP) disimpulkan bahwa prioritas perencanaan pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa berdasarkan dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Jepara yang terbaik adalah perencanaan pengembangan infrastruktur dimana dari pengembangan infrastruktur tersebut urutan prioritasnya adalah perbaikan jalan diprioritaskan untuk ruas jalan Pulau Kemojan-Mrican, jalan Pulau Parang dan Pulau Nyamuk, pengembangan transportasi baik darat, laut

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
					<p>dan udara serta pengembangan dermaga pelabuhan pembantu yang ada di Kecamatan Karimunjawa</p> <p>2) Dari Analisa sosial dan ekonomi laju pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Karimunjawa lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Jepara</p> <p>3) Analisa hukum dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengembangan Kecamatan Karimunjawa sebagai destinasi wisata bahari Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan peraturan daerah yang ada baik dari tingkat Provinsi Jawa Tengah ataupun Kabupaten Jepara</p> <p>4) analisis lingkungan dapat disimpulkan bahwa</p>

No	Judul Penelitian	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
					sebagian besar kawasan yang ada di Kecamatan Karimunjawa mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai kawasan budidaya yang dapat digunakan sebagai penunjang pariwisata bahari Kecamatan Karimunjaw
<p>Perbedaanya: Penelitian ini bertujuan Mendapatkan gambaran mengenai pengembangan infrastruktur wisata kuliner pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan dengan menggunakan Teknik analisis data menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif dengan metode analisis SWOT</p>					

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan, mengidentifikasi jenis-jenis dan potensi kuliner dan Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata, penelitian ini akan lebih berfokus dalam menganalisa konsep pengembangan infrastruktur untuk mendukung wisata kuliner yang berada di pantai galesong berdasarkan aspek keberlanjutan.

M. Sintesa Kajian Teori

Dengan metode pengembangan infrastruktur kawasan wisata kuliner berdasarkan aspek keberlanjutan didapatkan indikator-indikator dan faktor yang berpengaruh pada konsep pengembangan pariwisata dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sintesa Kajian Teori

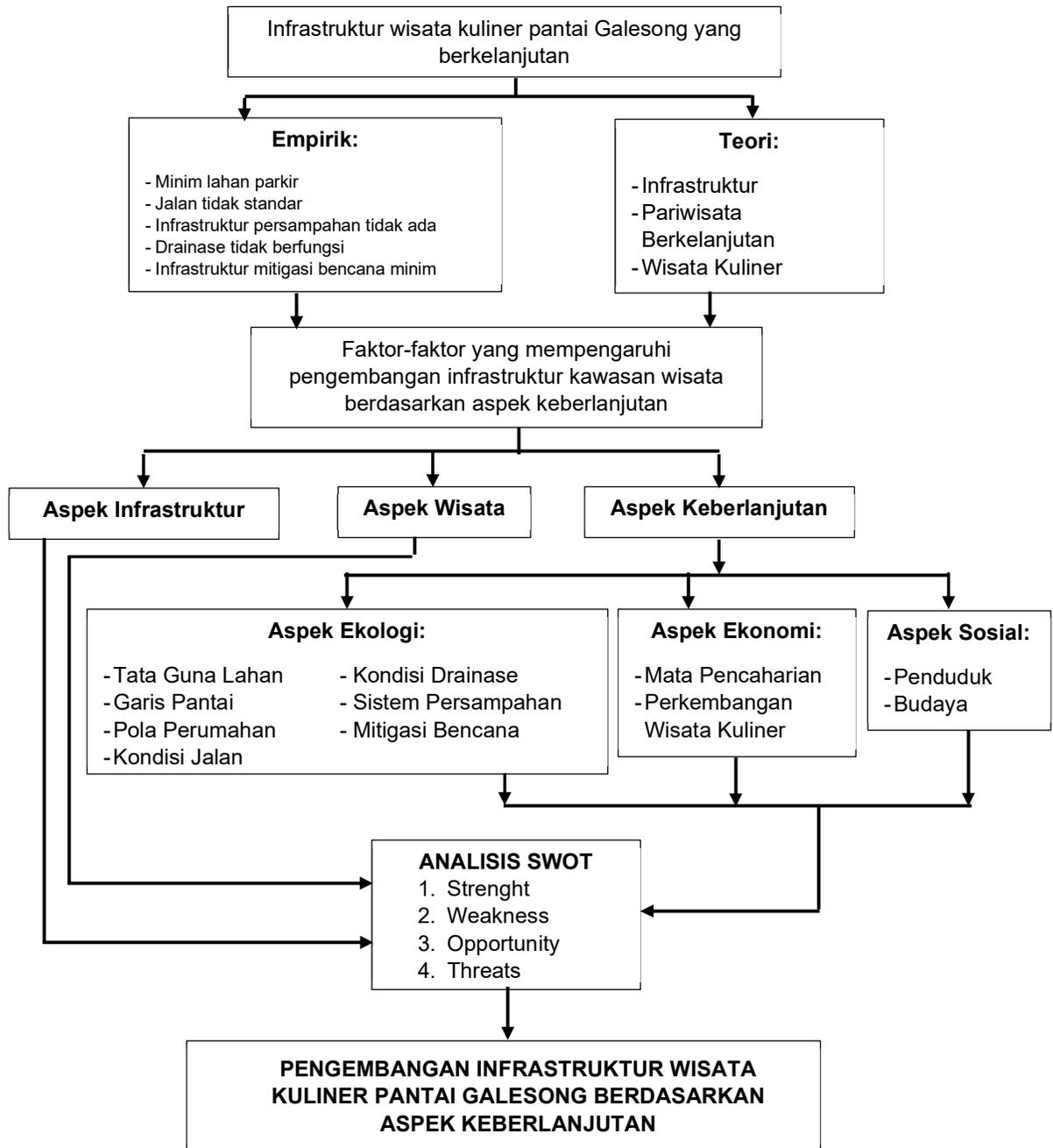
No	Teori	Ahli	Pernyataan	Aspek Yang Menunjang
1	Infrastruktur	Grigg (1988)	Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, penandaan, pengairan, drainase, tempat sampah, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi	Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat
		Hyman (1996)	infrastruktur sebagai barang kapital dengan menekankan pada aspek fisiknya	
		Kodoatie (2005)	Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung	

No	Teori	Ahli	Pernyataan	Aspek Yang Menunjang
			dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat	
2	Pariwisata Berkelanjutan	Pitana (2005)	Pariwisata yang dikelola mengacu pada pertumbuhan kualitatif, maksudnya adalah meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan kesehatan masyarakat	Pariwisata yang dikelola mengacu pada pariwisata yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan ketiga elemen utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui prinsip partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
		Sukma (2014)	Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.	
		Sulistyadi (2019)	Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicapai dengan menyeimbangkan ketiga elemen	

No	Teori	Ahli	Pernyataan	Aspek Yang Menunjang
			utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.	
3	Wisata Kuliner	Bondan Winamo (2008)	industri kuliner di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal karena keragaman makanan dan minuman khas yang ada disetiap daerah	wisata kuliner sebagai produk wisata penunjang bisnis kuliner di dalam industri pariwisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal karena keragaman makanan dan minuman khas yang ada disetiap daerah
Bachrul Hakim (2009)	memusatkan perhatian kita pada kiprah bisnis kuliner di dalam industri pariwisata Indonesia			
Besra (2012)	wisata kuliner dipasarkan sebagai produk wisata penunjang			

N. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan, sasaran serta tahapan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah tahapan berfikir yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penelitian



Gambar 4. Kerangka Pikir